

PERAN BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENGELOLA ASET NEGARA DI LINGKUNGAN DPR RI

DISUSUN OLEH
H. MAKMUR ABDURACHIM



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**

PERAN BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENGELOLA ASET NEGARA DI LINGKUNGAN DPR RI

DISUSUN OLEH
H. MAKMUR ABDURACHIM



PERAN BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENGELOLA ASET NEGARA DI LINGKUNGAN DPR RI



DISUSUN OLEH
H. MAKMUR ABDURACHIM

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**

Judul:

Peran Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
dalam Mengelola Aset Negara di Lingkungan DPR RI

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)
xii+156 hlm; 16,5x24 cm

ISBN: 978-602-53821-5-4

Cetakan Pertama, 2019

**Penulis:**

H. Makmur Abdurachim

Penyunting

Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H.

Pemeriksa Naskah Cetak

Yulia Indahri

Desain Sampul:

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Tata Letak:

Yulia Indahri

Diterbitkan oleh:

Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Gedung Mekanik Lt. 2

Jl. Gator Subroto Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.000 (empat miliar rupiah).

SAMBUTAN KETUA BURT DPR RI



Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya Buku *Peran Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Mengelola Aset Negara di Lingkungan DPR RI* ini dapat diselesaikan dan dapat kita maknai secara positif. Buku ini merupakan salah satu wujud dari model pertanggungjawaban kepada publik dalam rangka mewujudkan *good governance* dan model informasi penting yang dikemas secara singkat oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Kehadiran buku ini saya pandang sangat penting, baik bagi internal maupun eksternal. Dari sudut pandang internal, buku ini memberikan gambaran bagaimana sesungguhnya kinerja Biro Pengelolaan BMN yang bertanggung jawab langsung kepada Deputy Administrasi. Semoga melalui buku ini akan muncul evaluasi ke depan atas berbagai kekurangan sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BMN. Sementara dari sudut pandang eksternal, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang menjadi aset DPR dan bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Selain ditujukan kepada masyarakat, kehadiran buku ini juga perlu disampaikan kepada Pemerintah dan lembaga negara lainnya termasuk media massa guna memberikan informasi sekaligus mendapat *feedback* untuk kemajuan pengelolaan aset DPR RI di masa yang akan datang.

Sebelumnya Sekretariat Jenderal DPR RI telah mendapatkan penghargaan *BMN Award* (Penghargaan PNBPN dari Kementerian Keuangan) sebagai bentuk apresiasi Pemerintah atas kepatuhan pelaporan barang milik negara di lingkup Kesenjangan DPR RI di tahun 2011.

Tentunya capaian ini menjadi kebanggaan bagi DPR RI karena sebagai lembaga negara telah berprestasi dalam mengelola barang milik negara. Keberhasilan ini tentunya mengawali pengaturan yang lebih transparan dan akuntabel dari aset negara yang ada di DPR RI.

Rencana Strategis (Renstra) DPR RI untuk periode keanggotaan yang akan datang sudah sangat dinantikan keberadaannya. Renstra ini akan menjadi dasar kerja Sekretariat dan BK DPR RI yang sudah waktunya direvisi dan ditunggu gebrakannya terutama menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Mengakhiri sambutan ini, tidak berlebihan jika DPR RI berharap agar informasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Ketua BURT DPR RI
Dr. Capt. Anthon Sihombing

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI



Keberadaan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sangat penting bagi DPR RI. Tidak hanya bagi Anggota DPR RI Periode Keanggotaan 2014–2019 dan seluruh pegawai yang bekerja di kompleks Gedung DPR RI saat ini, tetapi juga bagi masyarakat saat ini dan di masa yang akan datang pada umumnya. Kemampuan pengelolaan barang negara yang baik menjadi cerminan DPR RI yang mampu membuat perencanaan dengan baik.

Biro Pengelolaan BMN telah dituntut untuk meningkatkan komitmen dalam pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kesekretariatan dan Badan Keahlian DPR RI, baik dalam rangka penatausahaan, pengamanan, penguatan, maupun pengamanan terhadap seluruh barang milik negara yang cukup besar. Namun tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam usahanya banyak ditemui berbagai macam permasalahan seputar pengelolaan barang milik negara.

Usaha menata aset secara akurat dan akuntabel memang memerlukan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran, mulai dari aparatur negara yang berada di ujung tombak pelayanan sampai dengan pejabat yang berada di tataran manajerial Biro Pengelolaan BMN agar seluruh barang milik negara dapat dipertanggungjawabkan, baik secara fisik maupun administrasi pelaporannya.

Salah satu upaya yang saya nilai sangat penting adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terus-menerus

terhadap seluruh pegawai terkait penatausahaan dan pengelola barang milik negara, serta mengintensifkan pembelajaran para pejabat Biro Pengelolaan BMN dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara serta tercatat dan ditertibkannya seluruh aset DPR RI.

Saya meyakini bahwa Biro Pengelolaan BMN saat ini berkomitmen kuat mengelola barang milik negara secara profesional dan optimal, yang dibuktikan dengan kinerja Biro Pengelolaan BMN yang semakin baik. Keberhasilan ini tidak diperoleh secara instan, karena Saya memahami bahwa profesionalitas personal Biro Pengelolaan BMN sudah dimulai sejak 2010 walaupun dalam nomenklatur yang berbeda.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, Saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN yang di sela-sela kesibukannya masih sempat menyusun Buku *Peran Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Mengelola Aset Negara di Lingkungan DPR RI* ini. Buku ini tidak hanya akan menjadi pustaka penting bagi kita semua yang berada di DPR RI tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Mari bersama kita benahi seluruh aset negara yang berada di Gedung DPR RI agar aset yang kita kelola saat ini dapat menjadi warisan berharga bagi generasi selanjutnya.

Sekretaris Jenderal DPR RI
Ir. Indra Iskandar, M.Si.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN KETUA BURT DPR RI	iii
SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI	v
DAFTAR ISI.....	vii
PROLOG	x
 BAB I	
SEJARAH GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	
REPUBLIK INDONESIA.....	1
 BAB II	
GAMBARAN UMUM TERHADAP BANGUNAN	
GEDUNG DPR RI ATAS PEMANFAATAN DAN	
PENGELOLAANNYA	7
PENGANTAR	8
PEMANFAATAN GEDUNG DPR RI	13
SEJARAH PENGUASAAN TANAH DPR RI	
ATAS SEJUMLAH GEDUNG DI KAWASAN	
PARLEMEN	16
 BAB III	
BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITAS	
GEDUNG DPR RI DARI MASA KE MASA.....	25
PENGANTAR	26
BANGUNAN GEDUNG DPR RI	28
BANGUNAN GEDUNG UNTUK	
RUANG KERJA ANGGOTA DPR RI.....	40
SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DPR RI	42
RUMAH JABATAN ANGGOTA DPR RI	56
WISMA GRIYA SABHA KOPO	70
FASILITAS PENDUKUNG LAIN.....	76

BAB IV**MIMPI TERBENTUKNYA**

GEDUNG DPR RI MODERN	89
PENGANTAR.....	90
KRONOLOGIS RENOVASI DAN PENGEMBANGAN KOMPLEKS PARLEMEN.....	91
TAHAPAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOMPLEKS GEDUNG KANTOR DPR RI	106
KENDALA DALAM PEMBANGUNAN KOMPLEKS PARLEMEN	107
RUANG KERJA ANGGOTA DPR RI	108

BAB V**ARSITEK PERUBAHAN DALAM PENGELOLAAN**

BARANG MILIK NEGARA.....	109
PENGANTAR.....	110
BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA.....	111
Tugas	111
Fungsi.....	111
Bagan Organisasi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara	112
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS.....	122
Visi	122
Misi	123
Tujuan	124
Sasaran Strategis.....	125
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	126
Arah Kebijakan	126
Strategi	126
Indikator Kinerja Utama.....	127
Sumber Daya Manusia.....	128
Keuangan	129
HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN	
BARANG MILIK NEGARA	130
TANTANGAN	134
UPAYA DAN OPTIMALISASI.....	135

BAB VI	
PENUTUP	139
EPILOG	143
DAFTAR BACAAN.....	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	147
TIM PENDUKUNG	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUNTING	156

PROLOG

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR RI adalah lembaga parlemen yang ada di Republik Indonesia sejak 29 Agustus 1945. Hingga saat ini setiap tanggal 29 Agustus diperingati sebagai hari lahirnya parlemen di Indonesia. Parlemen di Indonesia dari masa ke masa sudah mengalami perubahan, baik perubahan struktur lembaga parlemen, ataupun perubahan jumlah anggota parlemen serta adanya dukungan teknis, administratif dan keahlian dari lembaga Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Di masa awal pembentukan parlemen di Indonesia hanya dikenal DPR RI sebagai parlemen, tetapi di era Pemerintahan Orde Baru lembaga parlemen terdiri atas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sebagai lembaga tertinggi negara serta DPR RI sebagai lembaga tinggi negara. Parlemen di era Orde Baru dikenal dengan parlemen dua kamar, karena adanya MPR RI dan DPR RI. Di era Reformasi sejak tahun 1999, lembaga parlemen dua kamar berubah menjadi MPR RI, DPR RI serta adanya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Ketiga lembaga parlemen dalam bentuk tiga kamar ini menjadi satu-satunya lembaga parlemen dengan tiga kamar di dunia.

Buku ini bukan membicarakan kinerja DPR RI selama ini, tetapi buku ini ingin membuka mata pembaca, bahwa lembaga DPR RI tidak pernah akan ada, bila tidak ada bangunannya, yaitu sejumlah gedung yang berdiri di kawasan parlemen saat ini. Mungkin banyak yang belum mengetahui sejarah pembangunan gedung di DPR RI dan mungkin juga tidak banyak yang tahu siapa arsitek pembangunan gedung kura-kura. Gedung kura-kura, atau yang saat ini disebut Gedung Nusantara dirancang oleh arsitek Soejoedi Wirjoatmodjo Dipl. Ing. yang dibantu oleh Ir. Sutami sebagai orang yang mengusulkan pembangunan gedung parlemen secara bersamaan dengan kontraktor yang berbeda.

Hal terpenting dan utama dari mulai dikenalnya lembaga DPR RI di masyarakat, adalah Gedung DPR RI sebagai rumah rakyat yang tidak terlepas dari demonstrasi besar-besaran sejak Maret 1998 sampai

Mei 1998. Ketika itu banyak masyarakat yang memasuki halaman Gedung DPR RI untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran dan diizinkan gerbang utama dibuka untuk masyarakat oleh Pimpinan DPR RI. Ribuan orang masuk ke halaman DPR RI bahkan ada yang naik ke gedung kura-kura.

Terbukanya halaman Gedung DPR RI sejak Mei 1998 sampai selesainya proses amandemen UUD Tahun 1945 pada tahun 2002 berimplikasi ke wajah gedung parlemen, yang semakin tidak terawat dan tidak terpelihara karena sulitnya mengantisipasi keinginan masyarakat atau delegasi untuk masuk ke gedung parlemen, serta dimungkinkannya masyarakat masuk ke gedung parlemen untuk bertemu wakil mereka.

Salah satu keuntungan strategis dari DPR RI sebagai rumah rakyat, yaitu mulai dibangunnya Gedung Nusantara I sebagai ruang kerja Anggota DPR, dan sejak tahun 1997 sudah mulai ditempati. Semula rencana peruntukkan ruang kerja Anggota DPR di Gedung Nusantara I hanya untuk 800 orang. Saat ini Gedung Nusantara I sudah menampung kurang lebih 5.000 orang.

Selain itu, penambahan jumlah orang yang beraktivitas di Gedung Nusantara I juga berimplikasi ke wajah Gedung Nusantara I, baik terhadap isi dari gedung maupun kemampuan gedung untuk menampung beragam aktivitas baik barang maupun orang. Sehingga tidak heran kemampuan fisik bangunan juga berpengaruh dari hari ke hari.

Hal lain yang juga mendapat perhatian dunia internasional sejak tahun 1998 sampai saat ini adalah banyak kepala negara dan kepala pemerintahan berkunjung ke DPR RI untuk bertemu Pimpinan DPR RI dan Alat Kelengkapan DPR RI serta ingin melihat Gedung DPR RI serta fasilitas pendukung lainnya.

Satu hal yang mungkin terlupakan untuk melihat siapa arsitektur untuk merawat gedung tersebut, yaitu Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Eselon II di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Biro Pengelolaan BMN bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung-gedung di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 2016 s.d. sekarang.

Untuk merawat dan memelihara gedung dibutuhkan anggaran yang cukup besar dan memadai. Tetapi mengingat kemampuan negara dalam belanja negara, dalam praktiknya, biaya perawatan dan pemeliharaan gedung-gedung di DPR RI belum sesuai harapan dan usulan dari Biro Pengelolaan BMN DPR RI. Di sisi lain tanggung jawab besar ini harus dijalankan baik dalam perawatan dan pemeliharaan disesuaikan dengan DIPA yang diterima oleh Biro Pengelolaan BMN selama ini. Untuk itu tanggung jawab besar dan tantangan ini telah dijawab bersama dari Kepala Biro Pengelolaan BMN serta Bagian dan Sub-Bagian Pengelolaan BMN bersama dengan seluruh ASN dan tenaga kontrak yang dimiliki oleh Biro Pengelolaan BMN selama ini.

BAB I

SEJARAH GEDUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA*



* Disarikan dari buku Selayang Pandang Gedung DPR RI yang diterbitkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI, Tahun 2018.

Pemerintah Republik Indonesia pada bulan November 1964 telah membuka sayembara untuk rancang bangun kompleks Proyek *Conference of the New Emerging Forces* (Conefo) yang diikuti oleh tiga perusahaan konsultan perencanaan, yakni Binakarja, Virama Karja dan Perencana Djaja, dan seorang peserta perseorangan Soejoedi Wirjoatmodjo Dipl. Ing.

Sebagai tindak lanjut dari sayembara tersebut, Pemerintah memutuskan untuk membangun Proyek Conefo pada 8 Maret 1965 melalui Keputusan Presiden RI No 48 Tahun 1965. Selanjutnya, dari Keppres tersebut Pemerintah menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT) untuk melaksanakan pembangunan proyek *political venues*. Salah hal yang menjadi penting dalam pembangunan proyek tersebut, gedung harus selesai sebelum tanggal 17 Agustus 1966. Untuk merealisasikan proyek ini, Menteri PUT Soeprayogi menerbitkan Peraturan Menteri PUT No 6/PRT/1965 tentang Komando Pembangunan Proyek Conefo (Kopronef).

Dalam waktu tempo dua minggu setelah 8 Maret 1965, tim penilai yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno menetapkan karya rancang bangun Soejoedi Wirjoatmodjo Dipl. Ing. sebagai pemenang, dan kebetulan rancang bangun dari Soejoedi Wirjoatmodjo dilengkapi dengan maket rancang bangun tersebut. Maket terhadap rancang bangun dari Soejedi Wirjoatmodjo dibuat oleh Ir. Nurpontjo, dengan dibantu oleh Ir. Sutami.

Dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, atas saran Ir. Sutami maka pembangunan gedung diselesaikan dengan memecah kompleks bangunan dalam empat unit. Keempat uni terdiri dari ruang sidang utama, gedung sekretariat, auditorium dan gedung resepsi. Setiap unit dikerjakan secara bersamaan oleh kontraktor yang berbeda. Selanjutnya pembangunan gedung dimulai 19 April 1965. Pemancangan tiang pertama pada 19 April 1965 bertepatan dengan Dasa Warsa Konferensi Asia Afrika yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan.

Semula kawasan parlemen dibangun untuk keperluan *political venues* dalam rangka Conefo, yang kemudian dengan Keputusan Presidium Kabinet Ampera oleh Presiden Jenderal Soeharto setelah tahun 1966 dialihfungsikan menjadi Gedung DPR/MPR RI.

Dalam pembangunan gedung tersebut, pemerintah telah menunjuk enam kontraktor yaitu:

- 1) Perusahaan Negara Utama Karja melaksanakan pekerjaan *main conference building*.
- 2) PN Adhi Karja menangani penyelesaian gedung sekretariat.
- 3) PN Nindya Karja membangun gedung auditorium berikut *banquet hall*.
- 4) PN Waskita Karja menangani penyelesaian pembangunan danau dan plaza.
- 5) PN Widjaja Karja menggarap pekerjaan instalasi listrik.
- 6) PN Peprida menangani segi mekaniknya.

Kompleks Gedung DPR/MPR RI semula dibangun untuk bisa menampung konferensi internasional, sehingga segala macam bentuk pelayanan kepada seluruh calon pengguna konferensi internasional telah disiapkan. Salah satu yang juga dipersiapkan terhadap bangunan kompleks tersebut adalah penataan ruang luar bangunan di kawasan. Khusus untuk penataan ruang luar bangunan dipersiapkan oleh Ir. Slamet Wirasondja, M.L.A. bersama dengan sejumlah siswa ITB saat itu.

Dalam pelaksanaan pembangunan gedung ternyata tidak sesuai dengan rencana dalam Keppres karena meletusnya peristiwa G30S PKI. Akibat peristiwa ini, pembangunan yang semula harus selesai sebelum 17 Agustus 1966 menjadi tidak menentu. Untuk menuntaskan masalah ini maka Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera meluangkan waktu mengunjungi bangunan utama Kopronef tersebut. Setelah mengunjungi kompleks bangunan tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No 79/U/Kep/II/1966 tertanggal 6 November 1966. Keberadaan SK ini adalah ingin menegaskan bahwa pembangunan gedung harus diselesaikan dan gedung ini nantinya akan menjadi Gedung DPR/MPR RI.

Tahap pertama pembangunan bisa diserahterimakan dari Dirjen Cipta Karya kepada Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 15 Maret 1968. Adapun gedung yang diserahterimakan yaitu Gedung *Main Conference Building*. Tahap kedua diserahterimakan pada tanggal

20 Maret 1978 yaitu gedung Sekretariat Jenderal dan bangunan Balai Kesehatan. Pada bulan September 1982 telah diselesaikan pembangunan Auditorium dan Gedung *Banquet* diselesaikan pada Februari 1983.

Pembangunan gedung diikuti dengan pemberian nama gedung tersebut yang diambil dari bahasa Sansekerta. Bangunan *Main Conference Building* (gedung kura-kura) diberi nama *Grahatama*, Gedung *Press Center* atau ruang-ruang Komisi diberi nama *Ganagraha*. Gedung ruang kerja Anggota Dewan diberi nama *Lokawirasabha*. Ruang *Banquet Hall* menjadi ruang perpustakaan diberi nama Pustakaloka. Gedung auditorium beralih menjadi tempat sidang pleno diberi nama *Grahakarana*. Gedung Pascad menjadi Balai Kesehatan. Gedung Sekretariat Jenderal diberi nama *Samania Sasanagraha*.

Dalam perkembangannya penamaan gedung parlemen mengalami perubahan, setelah Pimpinan DPR RI pada tanggal 8 September 1998 menerima surat dari seorang Anggota DPR agar nama gedung parlemen yang menggunakan bahasa Sansekerta diubah ke bahasa Indonesia. Permintaan pergantian nama juga diikuti oleh surat dari 219 Anggota MPR yang mengusulkan perubahan nama tersebut. Untuk menindaklanjuti surat tersebut, telah diputuskan untuk membentuk Tim Pergantian Nama Gedung DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Ibu Hj. Fatimah Achmad. Tim bekerja mulai 4 Desember 1998 dan pada 14 Desember 1998 telah disetujui pergantian nama-nama gedung tersebut.

- 1) Gedung *Grahatama* menjadi Gedung Nusantara.
- 2) Gedung *Lokawirasabha Tama* menjadi Gedung Nusantara I.
- 3) Gedung *Ganagraha* menjadi Gedung Nusantara II dan Gedung Nusantara II Paripurna.
- 4) Gedung *Lokawirasabha* menjadi Gedung Nusantara III.
- 5) Gedung Pustakaloka menjadi Gedung Nusantara IV.
- 6) Gedung *Grahakarana* menjadi Gedung Nusantara V.
- 7) Gedung *Samania Sasanagraha* menjadi Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.
- 8) Gedung Mekanik Graha menjadi Gedung Mekanik.



Untuk mendukung kompleks bangunan tersebut, dibuat beberapa elemen estetika yang terdapat dalam beberapa ruangan serta di luar ruangan. Adapun elemen estetika dimaksud antara lain:

Tabel 1
Elemen Estetika di Gedung DPR RI

No	Elemen Estetika	Pencipta	Lokasi
1	Patung kontemporer	But Mochtar	Depan plaza
2	Pahatan timbul dari bahan kayu jati, berukuran 5 kali 2,5 meter, dengan tema Irama Sebuah Kebun	Sri Hadi	
3	Relief dengan tema Gotong-Royong, yang terbuat dari bahan tembaga	But Mochtar	Dekat kolam di depan
4	Lukisan dinding	Sadali	Gedung Nusantara II

6 | Peran Biro Pengelolaan BMN

No	Elemen Estetika	Pencipta	Lokasi
5	Relief awan	Kelompok seniman dari ITB	Lantai dasar Lobby Gedung Nusantara
6	Relief batu-batu pembangunan		Dinding Juar Pustakaloka
7	Lukisan dinding abstrak dengan judul "Kesaksian"	Sadali	Ruang Sidang Komisi III
8	Lukisan Kisah Ramayana	Sadali	Dinding Lobby Gedung Nusantara II

BAB II

GAMBARAN UMUM TERHADAP BANGUNAN GEDUNG DPR RI ATAS PEMANFAATAN DAN PENGELOLAANNYA



PENGANTAR

Gedung DPR RI yang berdiri saat ini, mulai dibangun pada 19 April 1965 untuk keperluan *political venues* dalam rangka *Conference of the New Emerging Forces* (Conefo), dan dengan Keputusan Presidium No 79/U/Kep/II/1966 tertanggal 9 April 1966 gedung ini menjadi Gedung DPR RI. Gedung DPR RI mulai terkenal sejak demonstrasi besar-besaran mulai Maret 1998 sampai didudukinya Gedung DPR RI pada bulan Mei 1998. Pendudukan masyarakat terhadap Gedung DPR RI berimplikasi terhadap perubahan ketatanegaraan di Indonesia, dengan berakhirnya masa Orde Baru ke Orde Reformasi.



Demonstrasi Mahasiswa di Gedung Nusantara, 1998

Sejak tahun 1998 sampai saat ini Gedung DPR RI, termasuk halaman dalam gedung dan luar halaman gedung menjadi tempat dilakukannya demonstrasi oleh institusi tertentu. Selain adanya demonstrasi tersebut, maka sejak tahun 1998, Gedung DPR RI menjadi rumah rakyat, karena sejak tahun 1998 DPR RI sudah terbuka untuk menerima delegasi masyarakat termasuk dalam hal pengaduan masyarakat ke wakil-wakil mereka di Gedung DPR RI.

Implikasi dari maraknya masyarakat yang berdemonstrasi serta terbukanya Gedung DPR RI sebagai rumah rakyat, memengaruhi fasilitas atas sejumlah ruangan yang ada di dalam Gedung DPR RI, serta fasilitas yang ada di sekitar Gedung DPR RI. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kerusakan di dalam gedung atau di sekitar gedung, termasuk pagar Gedung DPR RI yang beberapa kali roboh karena adanya sejumlah demonstrasi tersebut.



Demonstrasi Masyarakat di DPR RI, Pasca-1998

Ada sejumlah demonstrasi dan terbukanya Gedung DPR RI sebagai rumah rakyat dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Di satu sisi Gedung DPR RI sebagai rumah terbuka bagi rakyat dan di sisi lain pihak Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI harus bertanggung jawab terhadap segala implikasi tersebut. Peran dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terhadap hal ini sejalan dengan fungsi organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu memberikan dukungan teknis, administrasi dan keahlian. Dalam hal ini peran dari Sekretariat Jenderal DPR RI adalah di bidang pemberian dukungan teknis dan administrasi. Dukungan teknis dimaknai membenahi fasilitas Gedung DPR RI dan dukungan administrasi dilakukan dengan proses dukungan teknis harus didasarkan kepada dukungan administrasi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*).



Demonstrasi Masyarakat di DPR RI, Pasca-1998

Di awal berdirinya Gedung DPR RI tahun 1966 hanya berdiri beberapa bangunan Gedung DPR RI, seperti gedung kerja DPR, gedung Ruang Anggota DPR serta rumah dinas Anggota DPR RI. Di tahun-tahun berikutnya pembangunan Gedung DPR RI telah dijalankan hingga saat ini. Sehingga saat ini bangunan Gedung DPR RI terdiri atas:

- 1) Gedung sebagai Ruang Kerja Anggota DPR dalam menjalankan pelaksanaan fungsi DPR.
- 2) Gedung sebagai Ruang Anggota DPR RI dan Pimpinan DPR RI, termasuk Pimpinan Alat Kelengkapan DPR yang lain.
- 3) Rumah Dinas Jabatan Anggota DPR RI di Kalibata dan Ulujami.
- 4) Rumah Dinas bagi Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- 5) Gedung Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo di Ciawi Bogor.
- 6) Gedung Sekretariat.

Keenam gedung tersebut yang saat ini disebut sebagai Gedung DPR RI.

Di sisi lain, selain gedung-gedung DPR RI tersebut terdapat halaman di sekitar Gedung DPR RI. Juga terdapat beberapa fasilitas yang mendukung seperti 1) lapangan sepak bola; 2) lapangan tenis *indoor* dan *outdoor*; c) lapangan futsal; d) lapangan bulu tangkis; e) ruang *fitness*; dan beberapa fasilitas lain.



Lapangan Sepak Bola



Lapangan Tennis



Lapangan Futsal



Lapangan Bulu Tangkis



Ruang Fitness

Luasnya gedung dan unsur pendukung gedung-gedung DPR RI tidak terlepas dari luas lahan tempat Gedung DPR RI berdiri. Saat ini luas lahan Gedung DPR RI seluas 385.003 m². Luasnya lahan tersebut didukung oleh hak atas tanah dalam bentuk Sertifikat Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan ini diperpanjang setiap 3 tahun. Saat ini kepemilikan lahan DPR RI masih dipegang oleh Yayasan Gelora Bung Karno sebagai bagian dari Badan Pengelola Kawasan Bung Karno yang dipegang oleh Sekretariat Negara RI.

Di seputar Gedung DPR RI terdapat Masjid Baiturrahman yang dibangun secara swadana dari Anggota DPR, karyawan Sekretariat Jenderal DPR RI serta donasi dari beberapa sumber. Untuk merawat masjid tersebut dibuatlah aula pertemuan di bawah masjid tersebut. Aula pertemuan ini dikelola oleh Yayasan Baiturrahman.

PEMANFAATAN GEDUNG DPR RI

Pemanfaatan Gedung DPR RI tidak terbatas kepada kinerja Anggota DPR RI dalam menjalankan fungsinya serta peran dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI saja. Pemanfaatan juga melihat bagaimana infrastruktur dan suprastruktur atas gedung bangunan yang ada. Setiap bangunan gedung pasti memerlukan listrik, air dan gas serta segala yang mendukung efektivitas bangunan gedung tersebut. Oleh sebab itu tanpa peran infrastruktur dan suprastruktur tentu bangunan gedung tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu peran dari Bagian dan Sub-Bagian dari Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) juga mendukung aktivitas kegiatan pelaksanaan fungsi DPR dan kegiatan pemberian unsur dukungan kepada DPR RI.

Pemanfaatan Gedung DPR RI terutama untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Selain itu banyak juga hal yang dapat dilihat dari pemanfaatan Gedung DPR RI, di antaranya yaitu:

- 1) Sebagai tempat diselenggarakannya Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia setiap tahunnya.
- 2) Sebagai tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- 3) Sebagai tempat pelantikan Anggota MPR, DPR dan DPD.



Gedung Nusantara

- 4) Sebagai salah satu lokasi tujuan tamu negara, antara lain Kunjungan Raja Arab Saudi Pangeran Salman, pada 3 April 2017.
- 5) Sebagai tempat kegiatan lokakarya dan seminar.
- 6) Sebagai tempat pameran seni dan budaya.
- 7) Sebagai lokasi darmawisata dari sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi.
- 8) Sebagai lokasi diselenggarakannya Parlemen Remaja sejak tahun 2008 sampai saat ini.
- 9) Sebagai tempat ajang wisata bagi delegasi yang berkunjung ke DPR RI.
- 10) Sebagai tempat persinggahan Obor *Asian Games* dan *Asian Para Games* tahun 2018.



Dekorasi Dry Garden, Gedung Nusantara



Dekorasi Dry Garden, Gedung Nusantara

Untuk melihat bagaimana pemanfaatan Gedung DPR RI maka dilihat pada paparan berikut.

- 1) Gedung mempunyai Bagian Mekanikal dan Bagian Elektrikal.
- 2) Bagian Mekanikal didukung oleh:
 - a) Alat pendingin (*air condition*).
 - b) *Lift* orang dan *lift* barang.
 - c) Eskalator.
 - d) *Plumbing*.
 - e) *Sanitair*.
- 3) Bagian Elektrikal didukung oleh:
 - a) Bagian Elektrikal, yang dapat dibagi lagi atas:
 - 1) Listrik.
 - 2) Audio.
 - 3) Telepon.
 - 4) *Building Automatic System* (BAS).
 - b) Bagian Peralatan Teknis, yang dapat dibagi lagi atas:
 - 1) Gardu *cubicle* dan trafo.
 - 2) Gardu genset.
 - 3) Panel listrik.
 - 4) Lampu taman.
 - 5) Sistem *fire alarm*.
 - 6) Sistem pipa *hydrant*.
 - 7) MATV.
 - 8) *Conference System*.
 - 9) Sistem audio.
 - 10) PABX.
 - 11) Pesawat telepon.



**SEJARAH PENGUASAAN TANAH DPR RI
ATAS SEJUMLAH GEDUNG DI KAWASAN PARLEMEN**

Tanah yang saat ini dikuasai oleh DPR RI adalah berdasarkan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang ditandatangani pada hari Kamis, 16 Agustus 2018. Perjanjian ini merupakan perjanjian kedua setelah perjanjian sebelumnya pada tahun 2015. Perjanjian para pihak ini berlaku setiap 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pada perjanjian tersebut disebutkan:

- 1) DPR sebagai lembaga negara menggunakan sementara tanah yang berada di dalam kawasan Sertifikat Hak Pengelolaan No 1/Gelora, seluas 385.003 m².
- 2) Kementerian Sekretariat Negara selaku pemegang Hak Pengelolaan Atas Tanah seluas 2.664.210 m², atas nama Sekretariat Negara cq Badan Pengelola Gelora Senayan.

Berdasarkan perjanjian ini, maka di DPR telah didirikan sejumlah bangunan gedung kantor DPR RI untuk memenuhi kebutuhan ruangan kantor DPR RI.

Tabel 2
Bangunan Gedung DPR RI

No	Perjanjian Tahun 2015	Perjanjian Tahun 2018
1	Gedung Nusantara	Gedung Nusantara
2	Gedung Nusantara I	Gedung Nusantara I
3	Gedung Nusantara II	Gedung Nusantara II
4	Gedung Nusantara III	Gedung Nusantara III
5	Gedung Nusantara IV	Gedung Nusantara IV
6	Gedung Nusantara V	Gedung Nusantara V
7	Gedung Sekretariat Jenderal	Gedung Sekretariat Jenderal
8	Bangunan Masjid Baiturrahman dan Gedung Serbaguna	Bangunan Masjid Baiturrahman dan Gedung Serbaguna

No	Perjanjian Tahun 2015	Perjanjian Tahun 2018
9	Bangunan Garasi/ <i>Pool</i>	Bangunan Garasi/ <i>Pool</i>
10	Bangunan Ruang Kerja Bagian Kendaraan	Bangunan Ruang Kerja Bagian Kendaraan
11	Bangunan Mekanik	Bangunan Mekanik
12	Bangunan Kantor Ruang Kerja Biro Umum	Bangunan Kantor Ruang Kerja Deputi
13	Bangunan Pemadam Kebakaran	Bangunan Pemadam Kebakaran
14	Bangunan <i>Green House</i> dan Pembibitan	Bangunan <i>Green House</i> dan Pembibitan
15	Bangunan Kantin Risanti dan Pujasera Koperasi	Bangunan Kantin Risanti dan Pujasera Koperasi
16	Bangunan P3S dan Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI	Bangunan P3S dan Korpri Sekretariat Jenderal DPR RI
17	Bangunan <i>Copy Center</i> Koperasi	Bangunan <i>Copy Center</i> Koperasi
18	Bangunan Tempat Pengemudi	Bangunan Koperasi
19	Bangunan Bengkel Kendaraan	Bangunan Bengkel Kendaraan
20	Bangunan Kolam Air Mancur	Bangunan Kolam Air Mancur
21	Bangunan Tempat Penitipan Anak	Bangunan Tempat Penitipan Anak
22	Bangunan Kandang Rusa	Bangunan Kandang Rusa
23	Bangunan Rumah Dinas Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI	Bangunan Rumah Dinas Pimpinan Setjen DPR RI
24	Bangunan Sarana Olah Raga	Bangunan POSKOPAN
25	Bangunan Pos Jaga Pamdal	Bangunan Sarana Olah Raga
26	Bangunan Parkir Motor	Bangunan Pos Jaga Pamdal
27		Bangunan Parkir Motor
28		Bangunan Warung di Jantung Sehat
29		Bangunan Warung di <i>Pool</i> Kendaraan



Gedung Nusantara



Gedung Nusantara IV



Museum DPR RI, Gedung Nusantara



Museum DPR RI, Gedung Nusantara



Museum DPR RI, Gedung Nusantara



Ruang Tunggu VIP, Gedung Nusantara II



Ruang Tunggu VIP, Gedung Nusantara II



Ruang Tunggu VIP, Gedung Nusantara II



Air Mancur di Bawah Eskalator, Gedung Nusantara



Air Mancur di Bawah Eskalator, Gedung Nusantara



Taman Air Mancur Luar Belakang



Taman Aspirasi



Taman Aspirasi



Posko Pamdal Cepu 3



Posko Pengamanan Objek Vital



Pintu Gerbang Depan Kompleks Gedung DPR RI



Pintu Gerbang Depan Kompleks Gedung DPR RI



Pintu Gerbang Belakang Kompleks Gedung DPR RI



BAB III

BANGUNAN GEDUNG DAN FASILITAS GEDUNG DPR RI DARI MASA KE MASA



PENGANTAR

Bangunan gedung menurut UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

DPR RI mempunyai bangunan gedung di atas lahan seluas 385.003 m². Adapun bangunan gedung yang dimiliki oleh DPR RI, tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3
Bangunan Gedung Milik DPR RI

No	Nama Gedung	Luas	Jumlah Lantai
1	Gedung Nusantara	7.483 m ²	4 lantai
2	Gedung Nusantara I	22.665 m ²	23 lantai
3	Gedung Nusantara II	3.223 m ²	3 lantai
4	Gedung Nusantara II Paripurna	5.468 m ²	3 lantai ditambah lantai bawah
5	Gedung Nusantara III	9.040 m ²	4 lantai, basement, lantai mezanin
6	Gedung Nusantara IV	4.437 m ²	2 lantai
7	Gedung Sekretariat Jenderal	3.763 m ²	7 lantai
8	Gedung Mekanik	4.202 m ²	2 lantai
9	Pool Kendaraan	1.918 m ²	1 lantai
10	Gedung Pos Kopan	169 m ²	1 lantai
11	Gedung Pemadam Kebakaran	400 m ²	1 lantai
12	Tempat Penitipan Anak	515,41 m ²	1 lantai
13	Gedung Masjid Baiturrahman	2.451 m ²	2 lantai
14	Cepu Tiga	234 m ²	1 lantai
15	Gedung Layanan Kesehatan	1.272 m ²	1 lantai

15 Bangunan gedung di atas dikelola oleh Sub-Bagian Gedung dan Taman.



Dekorasi Dry Garden, Gedung Nusantara



Gedung Nusantara



Dekorasi Dry Garden, Gedung Nusantara

BANGUNAN GEDUNG DPR RI

Untuk menjalankan tugas dan fungsi DPR RI, maka kegiatan DPR RI dilakukan di sejumlah bangunan gedung sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4
Bangunan Gedung untuk Kegiatan Rapat DPR RI

Nama Ruang	Keterangan
Gedung Nusantara terdiri atas 3 lantai	
Ruang Rapat KK IV	Lantai 1
Ruang Rapat KK II	Lantai 1
Ruang Rapat KK III	Lantai 1
Ruang Rapat KK V	Lantai 1
Ruang Rapat Paripurna	Lantai 1
Museum	Mezanin
Ruang VIP Presiden	Lantai 3
Ruang Rapat	Lantai 3



Ruang Rapat KK V, Gedung Nusantara



Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara



Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara

Nama Ruang	Keterangan
Gedung Nusantara I terdiri atas 23 lantai	
Ruang Komisi VI	Lantai 1
Ruang Rapat Komisi VI	Lantai 1
Ruang Komisi VII	Lantai 1
Ruang Rapat Komisi VII	Lantai 1
Ruang Komisi IX	Lantai 1
Ruang Rapat Komisi IX	Lantai 1
Ruang Komisi XI	Lantai 1
Ruang Rapat Komisi XI	Lantai 1
Ruang Rapat Besar Fraksi PDIP	Lantai 1
Ruang Rapat Kecil Fraksi PDIP	Lantai 3 dan 4
Ruang Pimpinan Fraksi PDIP	Lantai 7
Ruang Rapat Fraksi Partai Demokrat	Lantai 9, 10 dan 21
Ruang Staf Ahli Fraksi Partai Demokrat	Lantai 21
Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar	Lantai 11, 14
Ruang Pimpinan Fraksi Partai Golkar	Lantai 12
Ruang Staf Ahli Fraksi Partai Golkar	Lantai 12
Ruang Poksi Fraksi Partai Golkar	Lantai 13
Ruang Komisi Fraksi Partai Golkar	Lantai 14
Ruang Rapat Fraksi PPP	Lantai 15
Ruang Tenaga Ahli Fraksi PPP	Lantai 15
Ruang Rapat Fraksi Gerindra	Lantai 17
Ruang Pimpinan Fraksi PKB	Lantai 18
Ruang Rapat Fraksi PAN	Lantai 19
Ruang Staf Ahli Fraksi PAN	Lantai 20



Pusat Penylaran dan Informasi Parlemen, Gedung Nusantara I



Pusat Penylaran dan Informasi Parlemen, Gedung Nusantara I



Ruang Anggota DPR RI, Gedung Nusantara I

Nama Ruang	Keterangan
Gedung Nusantara II terdiri atas 3 lantai	
Kantor Cabang Bank Mandiri	Lantai 1
Kantor Pos	Lantai 1
Ruang Rapat BURT	Lantai 2
Ruang Rapat Pansus D	Lantai 3
Ruang Rapat Pansus C	Lantai 3
Ruang Rapat Pansus B	Lantai 3
Ruang Pimpinan Pansus D	Lantai 3
Ruang Pimpinan Pansus C	Lantai 3
Ruang Pimpinan Pansus B	Lantai 3
Ruang TV Parlemen	Lantai 3



Gedung Nusantara II



Taman Gedung Nusantara II

Nama Ruang	Keterangan
Gedung Nusantara II Paripurna terdiri atas 3 lantai	
Ruang Rapat Komisi I	Lantai 1
Ruang Rapat Komisi III	Lantai 1
Ruang Rapat Komisi VIII	Lantai 1
Ruang Kerja Sekretariat	Lantai 1
Ruang Pimpinan	Lantai 1
Ruang Badan Kehormatan	Lantai 1
Ruang Rapat Pansus A	Lantai 2



Gedung Perpustakaan



Unit Layanan Kesehatan

Nama Ruang	Keterangan
Gedung Nusantara III terdiri atas 9 lantai	
Ruang Ketua	Lantai 3
Ruang Wakil Ketua Bidang Korpolkam	Lantai 3
Ruang Wakil Ketua Bidang Korinbang	Lantai 3
Ruang Badan Kehormatan	Lantai 4
Ruang Wakil Ketua Bidang Kesra	Lantai 4
Ruang Wakil Ketua Bidang Keuangan	Lantai 4
Ruang BKSAP	Lantai 4
Ruang AIPA	Lantai 6
Ruang Wartawan	Lantai 1
Bagian Humas	Mezanin
Bagian Pemberitaan	Mezanin
Bagian Perlengkapan	Basement
Ruang Kunci	Mezanin
Pamdal	Mezanin



Gedung Nusantara III



Ruang Kerja Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III



Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Gedung Nusantara III



Ruang Kerja Ketua BKSAP DPR RI, Gedung Nusantara III



Nama Ruang	Keterangan
Gedung Nusantara IV terdiri atas 4 lantai	
Ruang Serbaguna I	Lantai 2
Ruang Sekretariat TU Parlemen	Lantai 2
Ruang Padmanagri	Lantai 2
Ruang Diklat	Lantai 4
Ruang TV Parlemen	Lantai 3



Gedung Nusantara IV

Nama Ruang	Keterangan
Gedung Sekretariat Jenderal , terdiri atas 7 lantai	
Ruang Sekretaris Jenderal	Lantai 3
Ruang Badan Keahlian	Lantai 7
Ruang Deputi	Lantai 4
Ruang Kepala Biro	Lantai 2 dan 4
Ruang Kepala Bagian	Lantai 1–7
Ruang Staf Sekretaris Jenderal	Lantai 3
Ruang Rapat	Lantai 3
Ruang Diklat	Lantai 4



Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Ruang Kerja Sekretaris Jenderal DPR RI, Gedung Sekretariat



Ruang Kerja Sekretaris Jenderal DPR RI, Gedung Sekretariat

Nama Ruang	Keterangan
Gedung Mekanik terdiri atas 2 lantai	
Call Center, Ruang Mesin, Ruang Rapat	Lantai 1
Ruang Mesin	Lantai 1
Ruang Biro Pengelolaan BMN	Lantai 2
Ruang Bagian Gedung dan Instalasi	Lantai 2
Ruang Bagian Pengelolaan RJ	Lantai 2
Ruang Bagian Pengelolaan Wisma DPR RI	Lantai 2
Posko Pemadam Kebakaran	



Posko Pemadam Kebakaran



Posko Pemadam Kebakaran

BANGUNAN GEDUNG UNTUK RUANG KERJA ANGGOTA DPR RI

Sejak tahun 1997 DPR RI telah menempati bangunan Gedung Nusantara I sebagai ruang kerja Anggota DPR RI. Adapun ruang kerja anggota DPR tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5
Bangunan Gedung untuk
Ruang Kerja Anggota DPR RI

Ruang Kerja	Keterangan
Gedung Nusantara I	
Anggota Fraksi PKS	Lantai 3–4
Anggota Fraksi PDIP	Lantai 5–8
Anggota Fraksi Partai Demokrat	Lantai 9–10
Anggota Partai Golkar	Lantai 11–14
Anggota Fraksi PPP	Lantai 15–16
Anggota Fraksi Gerindra	Lantai 17
Anggota Fraksi PKB	Lantai 18
Anggota Fraksi F PAN	Lantai 19–20
Anggota Fraksi Nasdem	Lantai 23

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR RI dan Anggota DPR RI dibantu oleh Sekretariat dan Badan Keahlian DPR RI sebagai unsur pendukung teknis, anggaran, dan keahlian. Adapun ruang Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi tergambar dalam tabel berikut ini.

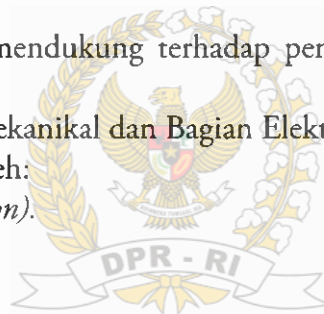
Tabel 6
Ruang Sekretariat Alat Kelengkapan DPR RI

Ruang Sekretariat	Keterangan
Gedung Nusantara I	
Sekretariat Komisi VII	Lantai 1
Sekretariat Komisi VI	Lantai 1
Sekretariat Komisi VIII	Lantai 1
Sekretariat Komisi IX	Lantai 1
Sekretariat Komisi X	Lantai 1
Sekretariat Fraksi PDIP	Lantai 7
Sekretariat Fraksi Partai Demokrat	Lantai 9
Sekretariat Partai Golkar	Lantai 11
Sekretariat Partai PPP	Lantai 15
Gedung Nusantara II	
Bagian Pemberitaan	Lantai 1
Sekretariat BURT	Lantai 2
Sekretariat Komisi II	Lantai 2
Sekretariat Komisi V	Lantai 2
Sekretariat Komisi IV	Lantai 2
Sekretariat Pansus D	Lantai 3
Sekretariat Pansus C	Lantai 3
Sekretariat Pansus B	Lantai 3
Gedung Nusantara II Paripurna	
Sekretariat Komisi I	Lantai 1
Sekretariat Komisi III	Lantai 1
Sekretariat Komisi VIII	Lantai 1

SARANA DAN PRASARANA GEDUNG DPR RI

Sarana dan prasarana yang mendukung terhadap pemanfaatan Gedung DPR RI yaitu:

- 1) Gedung mempunyai Bagian Mekanikal dan Bagian Elektrikal.
- 2) Bagian Mekanikal didukung oleh:
 - a) Alat pendingin (*air condition*).
 - b) *Lift* orang dan *lift* barang.
 - c) Eskalator.
 - d) *Plumbing*.
 - e) *Sanitair*.
- 3) Bagian Elektrikal didukung oleh:
 - a) Bagian Elektrikal, yang dapat dibagi lagi atas:
 - 1) Listrik, dengan pekerjaan dibagi atas 3 kelompok kerja (pokja) yang melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap seluruh peralatan kelistrikan, seperti a) trafo, b) *cubicle*, c) panel TM dan TR, d) instalasi kabel TM dan TR, e) lampu penerangan, dan seluruh peralatan kelistrikan lainnya.
 - 2) Audio, melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap peralatan yang masuk dalam sistem audio, seperti a) *Conference System*, b) *public address indoor* dan *outdoor*, dan c) LT Led.
 - 3) Telepon, melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap peralatan yang masuk dalam sistem telepon di kompleks DPR RI, seperti a) PABX, b) *line* telepon dan faksimile, c) pesawat telepon digital dan analog.
 - 4) *Building Automatic System* (BAS), yaitu pekerjaan melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap peralatan yang masuk ke dalam sistem BAS, seperti a) sistem penerangan, b) sistem AC, AHU, *chiller*, dan pompa, c) alarm, d) MA TV, d) TV *wall*, e) BTS.
 - b) Bagian Peralatan Teknis, yang dapat dibagi lagi atas:
 - 1) Gardu *cubicle* dan trafo.
 - 2) Gardu genset.
 - 3) Panel listrik.



- 4) Lampu taman.
- 5) Sistem *fire alarm*.
- 6) Sistem pipa *hydrant*.
- 7) MATV.
- 8) *Conference System*.
- 9) Sistem audio.
- 10) PABX.
- 11) Pesawat telepon.



Adapun sarana penunjang bangunan tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7
Sarana Bangunan Gedung

Jenis Sarana	Jumlah	Lokasi
AC Sentral	8	Gedung Nusantara I
	3	Gedung Nusantara II Paripurna
	5	Gedung Mekanik
<i>Air Handling Unit</i> (AHU)	17	Gedung Nusantara
	29	Gedung Nusantara I
	5	Gedung Nusantara II
	16	Gedung Nusantara II Paripurna
	10	Gedung Nusantara III
	6	Gedung Nusantara IV
<i>Fan Coil Unit</i> (FCU)	16	Gedung Nusantara II Paripurna
	65	Gedung Nusantara III
AC Split	655	Seluruh Gedung DPR RI

Sumber: Data Sarana dan Prasarana Biro Pengelolaan BMN, Juli 2018.

Selain sarana bangunan gedung tersebut, terdapat juga prasarana guna mendukung sarana bangunan Gedung DPR RI. Adapun prasarana penunjang bangunan gedung tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8
Prasarana Bangunan Gedung DPR RI

Jenis Prasarana	Jumlah
Gedung Nusantara	
<i>Lift</i>	8
Eskalator	4
Pompa Air Bersih	2
Pompa Air Kotor	3
<i>Hydrant</i> Grafitasi	10
APAR	73
Panel SDP	1
<i>Building Automatic System</i> (BAS) CPFA	1
BAS MDF	1
<i>Head Detector</i>	513
<i>Smoke Detector</i>	30
<i>Bell Alarm</i>	9
<i>Push Button</i>	9
<i>Conference System</i>	
Ruang Rapat KK I/Komisi I	43
Ruang Rapat KK II/Komisi II	140
Ruang Rapat KK III/Komisi III	54
Ruang Rapat KK IV/Komisi IV	43
Ruang Rapat KK V/Komisi V	47
Telepon Analog	12
<i>Extension Telepon</i>	37



Lift Gedung Nusantara



Trafo



Trafo



BAS MDF, Gedung Nusantara I



PABX, Gedung Nusantara I

Jenis Prasarana	Jumlah
Gedung Nusantara 1	
<i>Lift</i>	8
<i>Pompa Electric Sprinkler</i>	1
<i>Pompa Jockey Sprinkler</i>	1
<i>Pompa Diesel Sprinkler</i>	1
<i>Pompa Diesel Hydrant</i>	1
<i>Pompa Jockey</i>	1
APAR	341
<i>Sprinkler</i>	3234
Panel SDP	4
BAS CPFA	1
BAS MDF	1
<i>Head Detector</i>	1.615
<i>Smoke Detector</i>	23
<i>Jack Phone</i>	48
<i>Bell Alarm</i>	48
<i>Push Button</i>	48
<i>Conference System</i>	
Ruang Rapat Komisi VI	49
Ruang Rapat Komisi VII	50
Ruang Rapat Komisi IX	50
Ruang Rapat Komisi X	50
Ruang Rapat Komisi XI	50
Ruang Rapat Badan Anggaran	43
Ruang Rapat Baleg	46
Ruang Rapat Fraksi PKS	29
Ruang Rapat Fraksi PDIP	21
Ruang Rapat Fraksi Demokrat	43
Ruang Rapat Fraksi Golkar	22
Ruang Rapat Fraksi PPP	21
Ruang Rapat Fraksi Hanura	15

Jenis Prasarana	Jumlah
Ruang Rapat Fraksi PKB	18
Ruang Rapat Fraksi PAN	17
Ruang Rapat Fraksi Gerindra	36
Ruang Rapat Fraksi Nasdem	20
Telepon Analog	1.463
<i>Extension</i> Telepon	1.505
PABX	292 slot
Gedung Nusantara II	
<i>Lift</i>	2
Pompa Air Bersih	2
Pompa Air Kotor	4
Panel SDP	3
BAS CDFA	1
BAS MDF	1
<i>Head Detector</i>	207
<i>Smoke Detector</i>	5
<i>Bell Alarm</i>	11
<i>Push Button</i>	11
<i>Conference System</i>	
Ruang Rapat BURT	21
Ruang Rapat Pimpinan BURT	14
Ruang Rapat Pansus B	51
Ruang Rapat Pansus C	28
Telepon Digital	544
Gedung Nusantara II Paripurna	
<i>Lift</i>	5
Eskalator	6
Pompa Air Bersih	2
Pompa <i>Jockey</i>	1
Pompa Elektrik	1
Pompa Diesel	1



Conference System, Gedung Nusantara II Paripurna



Conference System, Gedung Nusantara II Paripurna



Eskalator, Gedung Nusantara II Paripurna



Eskalator, Gedung Nusantara II Paripurna

Jenis Prasarana	Jumlah
<i>Hydrant</i>	25
APAR	38
<i>Sprinkler</i>	820
BAS CPFA	1
BAS MDF	1
<i>Head Detector</i>	446
<i>Smoke Detector</i>	55
<i>Bell Alarm</i>	26
<i>Push Button</i>	26
<i>Conference System</i>	
Ruang Rapat Komisi I	48
Ruang Rapat Komisi III	48
Ruang Rapat Komisi VIII	48
Ruang Rapat Bangar	88
Ruang Rapat MKD	32
Ruang Rapat Panja	32
Paripurna	563
Ruang Rapat <i>Lobby</i> Paripurna	28
<i>Audio Centre</i>	1
Telepon Digital	35
Telepon Analog	284
<i>Extension</i> Telepon	188
Gedung Nusantara III	
<i>Lift</i>	2
Pompa Air Bersih	2
Pompa Air Kotor	4
<i>Hydrant</i> Graftasi	19
APAR	34
<i>Fire Aerosol System</i>	210
BAS SPFA	1
BAS MDF	1

Jenis Prasarana	Jumlah
<i>Head Detector</i>	285
<i>Smoke Detector</i>	8
<i>Bell Alarm</i>	17
<i>Push Button</i>	7
<i>Conference System</i>	
Ruang Rapih Lantai 3	23
Ruang Delegasi lantai 3	5
Ruang Rapat BKSAP Lantai 4	22
Ruang Rapat Pleno BKSAP Lt 4	27
Ruang Rapat Pimpinan BKSAP	6
Ruang Rapat BKSAP Lantai 6	13
Telepon Digital	43
Telepon Analog	95
<i>Extension Telepon</i>	138
PABX	120 slot
Gedung Nusantara IV	
<i>Hydrant Grafitasi</i>	8
APAR	20
<i>Fire Aerosol System</i>	92
Panel SDP	2
Panel SDP	1
BAS SPFA	1
BAS MDF	1
<i>Head Detector</i>	55
<i>Smoke Detector</i>	22
<i>Bell Alarm</i>	4
<i>Push Button</i>	18
<i>Audio Centre</i>	1
Telepon Digital	1
Telepon Analog	18
<i>Extension Telepon</i>	11



Pemasangan Aerosol



Pemasangan Aerosol



Pemasangan Aerosol



Pemasangan Aerosol

Jenis Prasarana	Jumlah
Gedung Mekanik	
Pompa Air Kotor	2
APAR	26
MV <i>Cubicle</i>	17
Trafo	5
Panel TR/LVMDP	5
Genset 800 KVA dan 500 KVA	DPR - R2 unit
Telepon Digital	15
Telepon Analog	42
<i>Extension Telepon</i>	46
Gedung Sekretariat Jenderal	
Pompa Air Kotor	2
<i>Hydrant</i> Grafitasi	20
APAR	67
<i>Fire Aerosol System</i>	2
<i>Head Detector</i>	313
<i>Smoke Detector</i>	10
<i>Push Button</i>	22
Telepon Digital	88
Telepon Analog	296
<i>Extension Telepon</i>	241
Pool Kendaraan	
Telepon Digital	1
Telepon Analog	10
<i>Extension Telepon</i>	7
Masjid	
Telepon Digital	3
Telepon Analog	14
<i>Extension Telepon</i>	15

Jenis Prasarana	Jumlah
Pos Pamdal	
Telepon Digital	1
Telepon Analog	18
<i>Extension Telepon</i>	18

Prasarana terhadap bangunan Gedung DPR RI di atas dikelola oleh:

- 1) Bagian Gedung dan Instalasi.
- 2) Sub-Bagian Gedung dan Taman.
- 3) Sub-Bagian Mekanikal.
- 4) Sub-Bagian Elektrikal.



Plaza Air Mancur



Air Mancur Belakang, Kompleks DPR RI

RUMAH JABATAN ANGGOTA DPR RI

Rumah Jabatan Anggota DPR RI terbagi atas:

- 1) Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI.
- 2) Rumah Jabatan Anggota DPR RI di Kalibata.
- 3) Rumah Jabatan Anggota DPR RI di Ulujami.

Rumah Ketua DPR RI sebagai Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI terletak di Kompleks Menteri Jl. Widya Chandra Jakarta Selatan.



Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, Jl. Widya Chandra



Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, Jl. Widya Chandra

Selain Rumah Pimpinan DPR RI untuk Ketua DPR, ada 5 Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI yang terletak di beberapa lokasi sebagai berikut:

- 1) Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan terletak di Jl. Kemanggisan Blok M 1 B, Jakarta Barat.



Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, Jl. Kemanggisan Blok M 1 B

- 2) Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan terletak di Jl. Denpasar Blok C III No 5 Kuningan, Jakarta Selatan.



Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, Jl. Denpasar Blok C III No 5

- 3) Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan terletak di Jl. Denpasar Blok C III No 3 Kuningan, Jakarta Selatan.



Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, Jl. Denpasar Blok C III No 3

- 4) Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua Bidang BAKN dan BURT, terletak di Jl. Kemanggisan Blok M 2 B, Jakarta Barat.



Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, Jl. Kemanggisan Blok M 2 B

- 5) Rumah Jabatan Sekretaris Jenderal DPR RI yang sementara waktu digunakan oleh Pimpinan DPR RI sebagai Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat, terletak di Jl. Lapangan Tembak, Jakarta Selatan.



Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, Jl. Lapangan Tembak



Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, Jl. Lapangan Tembak

Rumah Jabatan Anggota (RJA) terdapat di Kalibata dan di Ulujami Jakarta Barat. RJA Kalibata telah diserahkan dari Sekretariat Negara ke Sekteriat Jenderal DPR RI pada tahun 1997. Adapun data RJA Kalibat tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 9
Rumah Jabatan Anggota Kalibata

Luas Tanah 23 Hektare
Sertifikat Hak Pakai atas nama Sekretaris Negara

Blok	Jumlah Rumah	Luas Lahan
A	120	63.892 m ²
B	60	24.962 m ²
C	84	34.868 m ²
D	91	33.437 m ²
E	70	20.689 m ²
F	80	34.668 m ²



Foto Udara, RJA Kalibata



Gerbang RJAKalibata



RJAKalibata

Tabel 10
Sarana dan Prasarana
Rumah Jabatan Anggota Kalibata

Jenis	Jumlah
Lapangan Tenis	1, terletak di Blok E
Lapangan Bulutangkis	2, terletak di Blok A dan B
Lapangan Futsal	1, terletak di Blok E
Gedung Serbaguna	1, terdiri atas 3 lantai
Kantor Pengelola	1
Poliklinik	1
Masjid	2, terletak di Blok A dan F
Pos Utama	1 Posko Utama
Pos Jaga	11
Kantor Polisi	1
Taman Kanak-Kanak	1
Kantor Pos	1
Kantor Pemadam Kebakaran	1
Gudang Blok F	1
Pompa Air Bersih	2, terletak di Blok B dan F
STP	3, terletak di Blok A, E dan F



Masjid Al Amin, RJA Kalibata



Lapangan Tenis *Outdoor*, RJA Kalibata



Kantor Pemadam Kebakaran, RJA Kalibata



Gedung Serba Guna RJA Kalibata

RJA Kalibata:

- 1) Dihuni oleh Anggota sebanyak 214 rumah.
- 2) Dihuni oleh keluarga Anggota sebanyak 228 rumah.
- 3) Tidak dihuni sebanyak 63 rumah, tetapi kunci rumah dipegang oleh Anggota yang bersangkutan.



RJA Kalibata

Tabel 11
Hunian Rumah Jabatan Anggota Kalibata
Anggota DPR RI Periode 2014–2019

Fraksi	Status Hunian			Total
	Anggota	Keluarga	Kosong	
PPP	20	17	2	39
PKS	15	20	3	38
PKB	26	17	4	47
Demokrat	2	6	1	9
PAN	21	25	2	48
Gerindra	31	31	10	72
Nasdem	22	13	1	36
Hanura	8	8	0	16
PDIP	38	52	19	109
Golkar	31	39	21	91
Total				505

RJA Ulujami dibangun pada tahun 2004. RJA Ulujami saat ini dihuni oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat (2014–2019). Adapun data terkait RJA Ulujami tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 12
Rumah Jabatan Anggota Ulujami

Luas Tanah 3,2 Hektare
Sertifikat Hak Atas Tanah Hak Milik

Blok	Jumlah Rumah	Luas Lahan
A	29	6.960 m ²
B	22	5.280 m ²



Foto Udara, RJA Ulujami



Gerbang RJU Ulujami



Kantor Pengelola dan Unit Pelayanan Kesehatan, RJU Ulujami

Tabel 13
Sarana dan Prasarana
Rumah Jabatan Anggota Ulujami

Jenis	Jumlah
Mushola	1
Kantor Pengelola	1
Poliklinik	1
Kantor Pamdal	1
Pos Jaga	2
Rumah Pompa	1
Rumah Genset	1

Sumber: Data Sarana dan Prasarana, 2018.



Mushola Asy Syuro, RJA Ulujami



Rumah Pompa, RJA Ulujami

RJA Ulujami:

- 1) Dihuni oleh Anggota sebanyak 15 rumah.
- 2) Dihuni oleh keluarga Anggota sebanyak 22 rumah.
- 3) Tidak dihuni sebanyak 13 rumah, tetapi kunci rumah dipegang oleh Anggota yang bersangkutan.

Tabel 14
SDM Pengelola Rumah Jabatan Anggota

Jabatan	Jumlah	Keterangan
Kabag/ Eselon III	1 orang	Pusat
Kasubbag/Eselon IV	2 orang	Pusat
Staf PNS	7 orang	Pusat
	7 orang	RJA Kalibata
	6 orang	RJA Ulujami
Staf PTT	13 orang	Pusat
	5 orang	RJA Kalibata
	2 orang	RJA Ulujami

WISMA GRIYA SABHA KOPO DPR RI

Wisma DPR RI atau biasa disebut Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, berlokasi di Jl. Raya Puncak Km 79 Bogor Jawa Barat. Pembangunan Wisma DPR RI dilakukan melalui beberapa tahap pengembangan sebagai berikut:

- 1) Tahun Anggaran 1985 dibangun sarana prasarana ruang sidang, gedung serbaguna, *bungalow*, dan fasilitas pendukung lainnya, di atas tanah seluas 3 hektare.
- 2) Tahun Anggaran 2004/2005 dibangun *bungalow* tambahan di atas tanah seluas 1,4 hektare.
- 3) Tahun Anggaran 2005/2006 dibangun Ruang Sidang II.
- 4) Tahun Anggaran 2011/2012 dilakukan pembelian tanah seluas 1 hektare, yang direncanakan akan dibangun Pengembangan Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan penambahan Ruang Sidang.



Wisma DPR RI

Adapun aset yang terdapat dalam Wisma DPR RI tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 15
Aset Wisma DPR RI

Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
Kantor Pengelola	1	Luas 328 m ²
Ruang Sidang		
Ruang Sidang 1		Luas 621 m ²
Ruang Sidang Utama	1 ruang	Kapasitas 75–100 orang
Ruang Panja	2 ruang	Kapasitas per ruang 40 orang
Ruang Sidang 2		Luas 1.291 m ²
Ruang Sidang Utama	1	Kapasitas 100–150 orang
Ruang Panja	2	Kapasitas 60 orang
Ruang Serbaguna	1	Kapasitas 80 orang



Masjid Al Amin, Wisma DPR RI



Lapangan Tenis *Outdoor*, Wisma DPR RI



Ruang Sidang II, Wisma DPR RI



Gedung Serba Guna, Wisma DPR RI



Bungalow Wisma DPR RI



**Pusdiklat Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,
Wisma DPR RI**



Kantor Pengelola Wisma DPR RI

Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
Gedung Serbaguna	1	Luas 328 m ² Kapasitas 100 orang
Masjid	1	Luas 349 m ²
Sarana Olahraga		
Lapangan Tenis	1	<i>Outdoor</i> , luas 230 m ²
Lapangan Bulutangkis	1	<i>Outdoor</i> , luas 676 m ²
Kolam Renang	1	2 kolam renang <i>outdoor</i> , luas 325 m ²
Ruang Terbuka		
Halaman dan taman		Luas 27.217 m ²
Jalan		Luas 8.615 m ² , termasuk area parkir
Saluran Drainase		Luas 38,76 m ²
Bungalow		
<i>Bungalow</i> VIP	8 unit	Tipe 120 m ² , 2 kamar utama, 1 kamar supir
<i>Bungalow</i> Zona B	24 unit	Tipe 70 m ² , 2 kamar utama
<i>Bungalow</i> Zona A	22 unit	Tipe 50 m ² , 2 kamar utama
<i>Bungalow</i> Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI	2 unit	Luas 329 m ²
Pos Pamdal	2	Luas 28 m ²

Sumber: Bagian Pengelola Wisma DPR RI, 2018.

Tabel 16
SDM Pengelola Wisma DPR RI

Jabatan	Jumlah	Keferangan
Kabag/ Eselon III	1 orang	Pusat
Kasubbag/Eselon IV	2 orang	Pusat
Staf PNS	3 orang	Pusat
	22 orang	Wisma DPR RI
Staf PTT	7 orang	Pusat
	17 orang	Wisma DPR RI

Sumber: Bagian Pengelola Wisma DPR RI, 2018.



Air Mancur, Wisma DPR RI



Lukisan Mural, Wisma DPR RI

FASILITAS PENDUKUNG LAIN

Di seputar bangunan Gedung DPR RI tidak semua digunakan untuk urusan kedinasan atau urusan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI. Ada beberapa bagian Gedung DPR RI dimanfaatkan oleh pihak internal Sekretariat Jenderal DPR RI serta pihak eksternal DPR RI. Semua bangunan gedung yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga merupakan bangunan sebagai barang milik negara yang dikelola oleh Biro Pengelolaan BMN. Pemanfaatan bangunan gedung tersebut didasarkan kepada Perjanjian Sewa Menyewa antara para pihak, dan pemanfaatan atas bangunan gedung tersebut dikenakan pajak dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun pemanfaatan tanah dan bangunan gedung tesebut tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 17
Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung
oleh Pihak Ketiga

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
Bank Mandiri	
Gedung Nusantara II, Lantai 1	Kantor Bank Mandiri, luas 349,7 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 1	3 ATM, luas 9,66 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 2	ATM, luas 9 m ²
Perumahan RJA Kalibata, Blok A dan F	ATM, luas 3,22 m ² (A) ATM, luas 1,76 m ² (F)
Perumahan RJA Ulujami	ATM, luas 10,2 m ²
Bank BRI	
Perumahan RJA Kalibata, Blok A	ATM, luas 3,22 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 1	2 ATM, luas 6,44 m ²



ATM Center, Gedung Nusantara II



ATM Bank Mandiri, RJA Ulujami

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
Bank BNI	
Gedung Nusantara II, Lantai 1	ATM, luas 3,173 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 1	2 ATM, luas 6 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 1	Kantor Bank BNI, luas 88,96 m ²
Perumahan RJAKalibata	ATM, luas 3,22 m ²



Bank BNI



Bank BNI

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
Bank BCA	
Gedung Nusantara I	ATM, luas 1 m ²



Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
PT Indosat	
Gedung Nusantara I, <i>Basement</i>	Menara BTS dan Alat Penguat Sinyal, luas 3 m ²
Gedung Nusantara I, Lantai 24	Luas 0,49 m ²
Gedung <i>Basement</i>	Perangkat seluler, luas 12 m ²
Gedung Nusantara	Perangkat seluler, luas 12 m ²
PT XL Axiata	
Gedung Nusantara I	Peralatan dan antena,
Gedung Nusantara II	Antena GSM
Gedung Nusantara III	Penempatan RBS, luas 4 m ²
Telkomsel	
Gedung Sekretariat Jenderal DPR	Peralatan dan antena GSM



PT XL Axiata, Antena GSM



Telkomsel, Perangkat Seluler



Telkomsel, Antena GSM

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
PT Pos Indonesia Gedung Nusantara II, Lantai 1	Kantor Pos, luas 40 m ²



PT Pos Indonesia

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
PT Jawa Tengah Citra Boga Gedung Jantung Sehat	Rumah Makan, luas 140 m ²



PT Jawa Tengah Citra Boga

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
PT Masa Depan Bersama	
Gedung Nusantara II, Lantai 1	Bengawan Solo Café, luas lahan 25,42 m ² dan luas bangunan selasar 41,78 m ²



PT Masa Depan Bersama

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
Yayasan Bina Baiturrahman	
Ruang Serbaguna Masjid Baiturrahman	Luas 989 m ²



Yayasan Bina Baiturrahman, Masjid Baiturrahman

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
Dharma Wanita Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR	
Bangunan depan Pool Kendaraan	Kantin, luas 342,29 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 1	Toko Suvenir, luas 133,64 m ²



**Dharma Wanita Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI, Kantin**



**Dharma Wanita Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI, Toko Suvenir**

Pihak Penyewa/Lokasi	Bentuk Bangunan
Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR	
Tanah dan bangunan di belakang TVRI	Kantor Koperasi, luas 69,52 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 1	Kantor, luas 85,53 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 3	Kantor, luas 112,29 m ²
Gedung Nusantara II, Lantai 1	Agen Perjalanan, luas 21,53 m ²
Bangunan Parkir Motor	Pujasera seluas 677,39 m ²
Kantor P3S Sekretariat Jenderal	Ruang Foto Copy, luas 124,57 m ²
Wisma Griya Sabha Kopo	Mini Market, luas 30 m ²
Perumahan RJA Kalibata	Mini Market, luas 130,83 m ² dan 123,56 m ²

Sumber: Sejumlah Perjanjian Sewa Menyewa, 2016–2018.



Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Kantor



**Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI, Agen Perjalanan**



**Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI, Pujasera**



Pool Kendaraan



Bangunan Parkir Motor



**Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI, Mini Market RJA Kalibata**



**Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian DPR RI, Mini Market Gedung DPR RI**



BAB IV

MIMPI TERBENTUKNYA GEDUNG DPR RI MODERN



PENGANTAR

Mimpi untuk membentuk lembaga parlemen yang modern tidak terlepas dari Visi DPR RI dalam Renstra DPR RI 2015–2019 yang menyebutkan bahwa Visi DPR RI adalah “Terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang modern, berwibawa dan kredibel”. Adapun maksud dari visi lembaga perwakilan yang modern adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR RI menginginkan adanya transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dan terbukanya ruang partisipasi publik serta dapat dipertanggungjawabkannya kinerja DPR RI kepada rakyat.

Pembangunan Gedung DPR RI yang modern saat ini bukanlah suatu keinginan semata dari DPR, tetapi mengingat Gedung DPR RI saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kinerja Anggota DPR. Hal ini dapat dilihat dari kritikan masyarakat ke DPR yang sering melakukan rapat di luar gedung. Jika dilihat dari sejarah pembangunan Gedung DPR RI, seperti Gedung Nusantara (gedung kura-kura) yang dibangun pada tahun 1968 setiap tahunnya perlu direnovasi. Bahkan gedung Anggota DPR di Gedung Nusantara I saat ini sudah ditempati lebih dari 5.000 orang dibandingkan kapasitas normal yang ideal sebanyak 800 orang.

Pembangunan gedung baru DPR diperlukan karena di kompleks DPR saat ini berdiri 3 lembaga negara, yaitu lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan DPR sendiri. Ketiga lembaga negara membutuhkan lahan dan bangunan guna menunjang fungsi dari ketiga lembaga tersebut dalam menjalankan tugas konstitusional seperti diamanatkan dalam UUD Tahun 1945.

Rencana pembangunan gedung parlemen modern tersebut tidak terlepas juga dari kejadian gempa di Jakarta pada tahun 2017 dan 23 Januari 2018, yang berimplikasi langsung karena memengaruhi kualitas bangunan Gedung Nusantara I. Pasca-kejadian gempa tersebut, telah dilakukan audit bangunan gedung oleh Kementerian PUPR pada 22 Desember 2017 serta tahun 2018. Hasil dari audit tersebut telah ditindaklanjuti oleh Biro Pengelolaan BMN.

KRONOLOGIS RENOVASI DAN PENGEMBANGAN KOMPLEKS PARLEMEN

DPR RI melalui Alat Kelengkapan DPR RI telah sering melakukan kunjungan ke parlemen dunia sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Di antara kunjungan kerja tersebut terdapat harapan untuk membangun gedung parlemen yang modern seperti gedung parlemen yang ada di sejumlah negara.

Walaupun ide pembangunan gedung parlemen yang modern sudah ada sejak tahun 2010, baru pada tahun 2015 ide tersebut direalisasikan oleh Pimpinan DPR RI Periode 2014–2019.

Untuk mendapatkan gedung parlemen yang representatif, maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh DPR, antara lain:

- 1) Permohonan DPR terhadap pengelolaan dana dan gedung eks Taman Ria Senayan, sejak tahun 2014–2016.
- 2) Permohonan pengelolaan Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam beberapa kali rapat telah dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - a) Pemerintah tidak berkeberatan bahwa MPR, DPR dan DPD akan memanfaatkan lahan di Kemenpora sebagai bagian dari kompleks legislatif.
 - b) Mendukung dan menyetujui untuk Pemerintah mengatur segera pemindahan Gedung Kemenpora yang berada dalam Kompleks Gelora Bung Karno.
 - c) Meneruskan kerja tim dari Pemerintah dan MPR, DPR dan DPD masing-masing Sekretariat Jenderal dalam mempersiapkan penataan kembali kompleks legislatif dan Senayan secara menyeluruh.
- 3) Pengelolaan tanah Setneg DPR RI untuk digunakan oleh DPR RI, dengan adanya Perjanjian antara Sekretariat Negara dengan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang pemanfaatan tanah Setneg oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Sehingga sejak tahun 2015 dilakukan Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara, yang setiap 3 tahun perjanjian ini diperbaharui oleh para pihak.

- 4) Proses Izin Pembangunan berupa surat permohonan dari Ketua DPR RI ke Pemerintah, sejak tahun 2015–2016.
- 5) Analisis Biaya dan Penjadwalan dari Kementerian PUPR terhadap rencana pembangunan kompleks parlemen yang telah menghasilkan taksiran biaya pembangunan kompleks parlemen.
- 6) Pelaksanaan Sayembara Desain Arsitektur dan Pengembangan Kompleks Parlemen DPR RI.

Di sisi internal DPR RI, untuk pembangunan kompleks parlemen telah dilakukan serangkaian kegiatan penunjang pembangunan kompleks parlemen tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya merealisasikan visi dan misi DPR RI 2009–2014. Pimpinan DPR RI ketika itu telah melakukan beberapa rapat pimpinan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 18
Rapat Pimpinan Perihal Pembangunan Gedung

Rapat	Pihak	Waktu
Koordinasi	Pimpinan DPR RI dengan: a) Kementerian PUPR; b) Universitas Indonesia; c) Ikatan Arsitektur Indonesia; dan d) Sekretariat Jenderal DPR RI	Selasa, 17 Maret 2015
Konsultasi	Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi	Rabu, 1 April 2015
Rapat	BURT DPR RI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI	Kamis, 2 April 2015
Pertemuan Konsultasi	Pimpinan DPR RI dengan Ketua dan Sekretaris Fraksi-Fraksi DPR RI	Senin, 6 April 2015
Koordinasi	Pimpinan DPR RI dengan: a) Pimpinan BURT DPR RI; b) Sekretariat Jenderal DPR RI; dan c) Tim Universitas Indonesia	Selasa, 14 April 2015

Rapat	Pihak	Waktu
Konsultasi	Pimpinan DPR RI dengan: a) Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI; b) Pimpinan BURT DPR RI; c) Sekretariat Jenderal DPR RI; d) Kementerian PUPR; e) LKPP; f) Tim Universitas Indonesia; dan g) Ikatan Arsitektur Indonesia	Rabu, 22 April 2015
Pertemuan	Pimpinan DPR RI dengan Presiden RI	Jumat, 16 Desember 2016
Koordinasi	Pimpinan DPR RI dengan: a) Pimpinan BURT DPR RI dan b) Sekretariat Jenderal DPR RI	Kamis, 12 Januari 2017

Untuk melaksanakan sejumlah keputusan yang dilakukan oleh Pimpinan DPR di atas, DPR RI telah melakukan proses surat menyurat ke Presiden RI untuk mendapatkan izin pembangunan Gedung DPR RI tersebut. Adapun proses administrasi tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Pemberi Surat	Penerima Surat
Surat Ketua DPR RI kepada Yth Presiden RI Nomor PW/03252/ DPR RI/ II/2015, tanggal 10 Februari 2015. Perihal Permohonan Izin Melanjutkan Pembangunan Perpustakaan dan Museum	Surat Jawaban dari Menteri Sekretaris Negara Nomor B – 229/MSesneg/H.00.01/02/2015, tanggal 27 Februari 2015 Perihal Persetujuan Melanjutkan Pembangunan Perpustakaan dan Museum

Pemberi Surat	Penerima Surat
Surat Sekjen DPR RI Nomor DA/03523/ SEKJEN DPR RI/ HR/03/2015, tanggal 6 Maret 2015 Perihal Ralat Surat Permohonan Izin Penataan Kawasan Lembaga Legislatif dan Pembangunan Gedung DPR RI, Perpustakaan dan Museum	Surat Jawaban dari Menteri Sekretaris Negara Nomor B – 264/M.Sesneg/D.3/ HL.00.01/03/2015, tanggal 16 Maret 2015
Surat Ketua DPR RI Nomor DA/08251/Serjen DPR RI/ PB.02/05/2016, tanggal 19 Mei 2016	Surat Jawaban dari Deputy Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Sekretaris Kabinet RI Nomor B-549/Polhukham/6/2016, tanggal 21 Juni 2016
Surat Plt Sekjen DPR RI Nomor SJ/00718/ SETJEN DPR RI/ PB.02/01/2017, tanggal 17 Januari 2017	

Untuk merealisasikan pembangunan Gedung DPR RI yang modern tersebut, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan Nota Kesepahaman serta Nota Kesepakatan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk menyelenggarakan Sayembara Desain Arsitektur Renovasi dan Pengembangan Kompleks Parlemen. Pembiayaan kegiatan sayembara tahun 2015 telah direview oleh BPKP, dengan pagu awal sebesar Rp3.087.900.000, dan HPS sebesar Rp1.487.900.000, nilai kontrak sebesar Rp1.175.210.000, dengan realisasi sebesar Rp1.475.210.000.

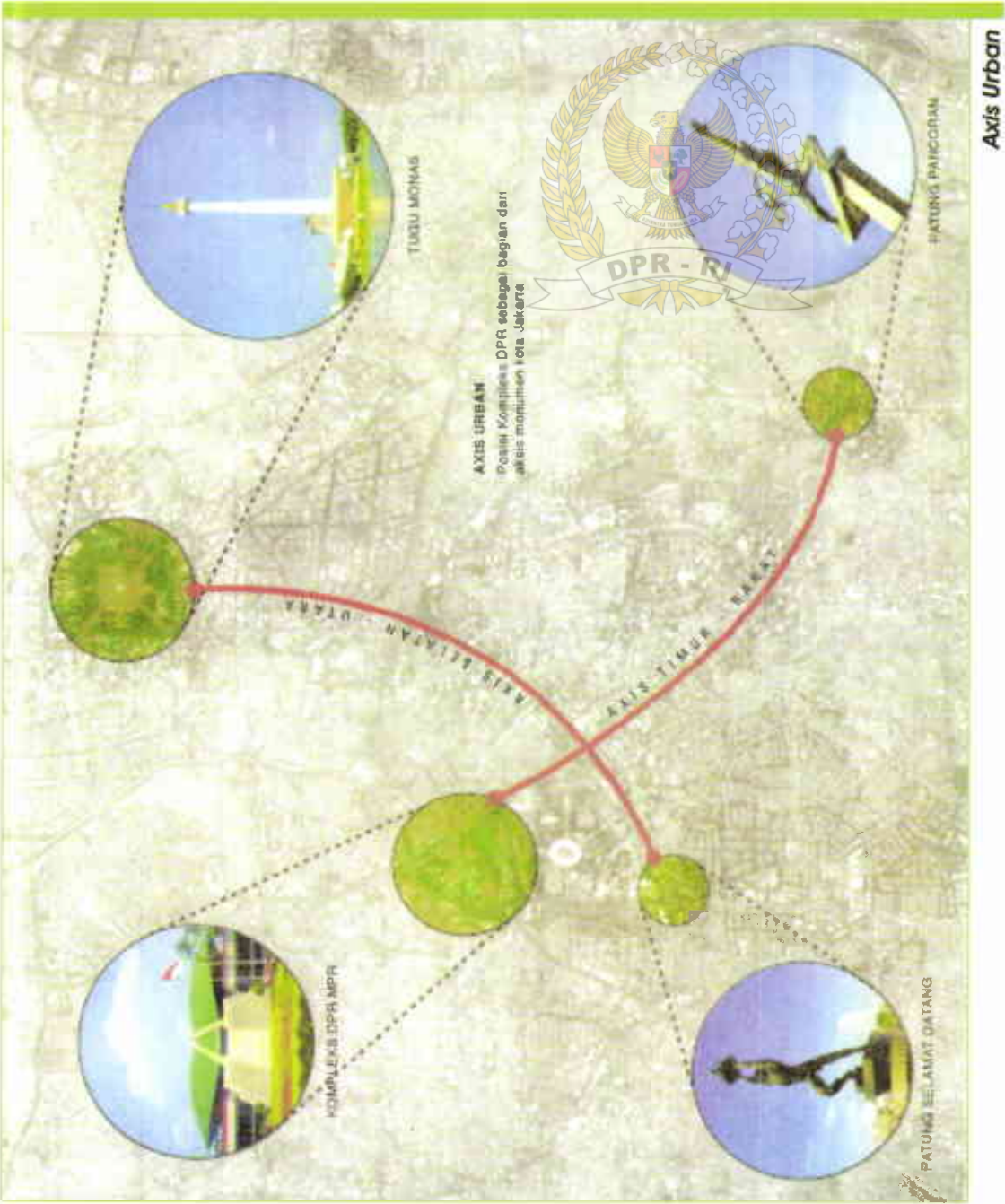
Dalam sayembara yang diselenggarakan sejak tanggal 10 Juli sampai dengan 30 Oktober 2015 tersebut, panitia telah menerima 7 proposal/karya. Dewan juri yang terdiri dari:

- 1) Ir. Adjar Prajudi MCm, MCE.
- 2) Dr. Ir. Ady R. Thahir, M.A.
- 3) Prof. Baharudin Hamzah, Ph.D.
- 4) Prof. Ir. Gunawan Tjahyono, M.Arch. Ph.D.

- 5) Han Awal, Dipl. Ing. IAI
- 6) Ir. Ridwan Kamil, M.U.D.
- 7) Prof. Mohamad Danisworo, M.Arch, Ph.D.

memutuskan pemenang sayembara tersebut yaitu peserta No SDARPKPRI 007 atas nama Ir. Gregorius Supie Yolodi, IAI dan KSO dengan PT Arkonin.

Pimpinan DPR memutuskan bahwa sayembara dinyatakan selesai sampai dengan tahap pemenang sayembara dan tidak dilanjutkan ke tahap pra-rancangan. Pada prinsipnya *masterplan* disetujui, akan tetapi fasad gedung perlu *penyempurnaan*.



MASTERPLAN

LEGENDA

- 1 Alun-Alun Utara
- 2 Alun-Alun Selatan
- 3 Jalan Seremonial
- 4 Gedung Nusantara
- 5 Ruang Resepsi
- 6 Gedung Nusantara III
- 7 Alun-Alun Rakyat
- 8 Masjid
- 9 Alun-Alun Dempas
- 10 Lapangan Olahraga
- 11 Gedung Seru Nusantara 1A
- 12 Koridor Nusantara
- 13 Stasiun Kereta
- 14 halte Bus



**RENOVASI DAN PENGEMBANGAN
KOMPLEKS PARLEMEN DPR**

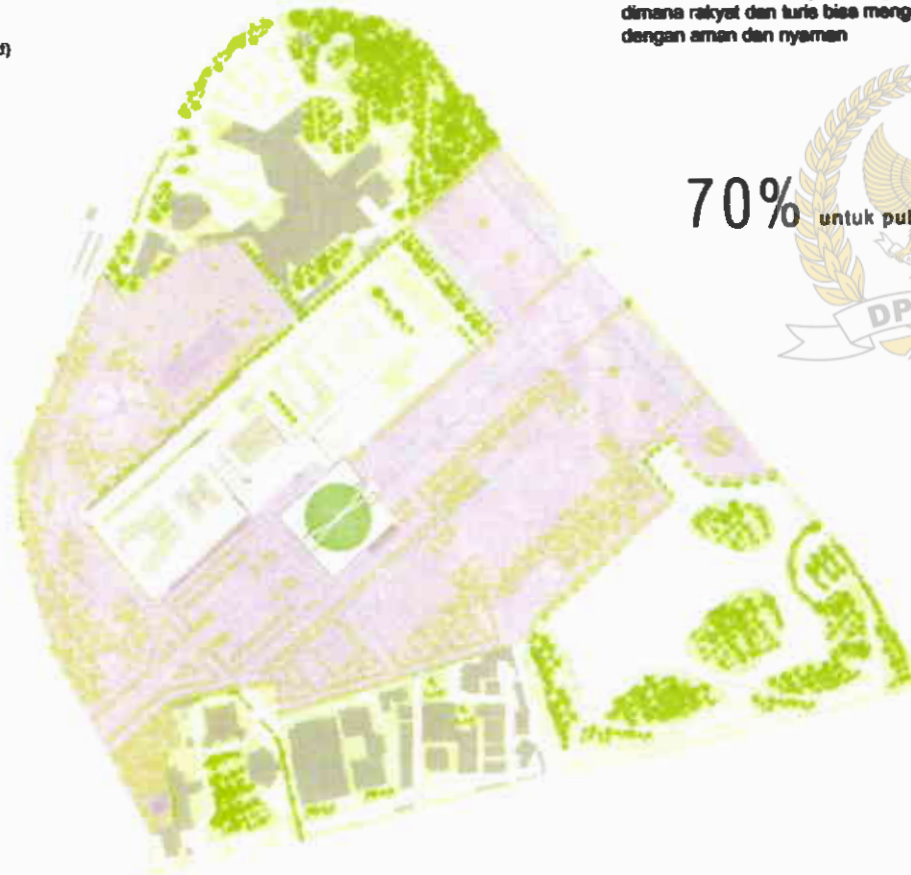
Masterplan

MASTERPLAN



ZONING: PUBLIC SPACE (open)

- Public Space (open)
- Public Space (covered)
- Private Space
- Corridor Access



Kompleks untuk publik





Penegasan alokasi dan zonasi bisa mengembalikan 2/3 kawasan ini ke rakyat sebagai public space, dimana rakyat dan turis bisa mengelilingi kawasan dengan aman dan nyaman

70% untuk public space



Zoning: Public Space (Open)

ZONING: PUBLIC SPACE (covered)

-  Public Space (open)
-  Public Space (covered)
-  Private Space
-  Corridor Access



Kompleks untuk publik

Covered public space berfungsi selain sebagai tempat publik berkumpul, juga sebagai ruang transisi antara publik dan privat, dimana para anggota dewan juga dapat menyambut tamu.



Zoning: Public Space (Covered)

ZONING: PRIVATE & CORRIDOR

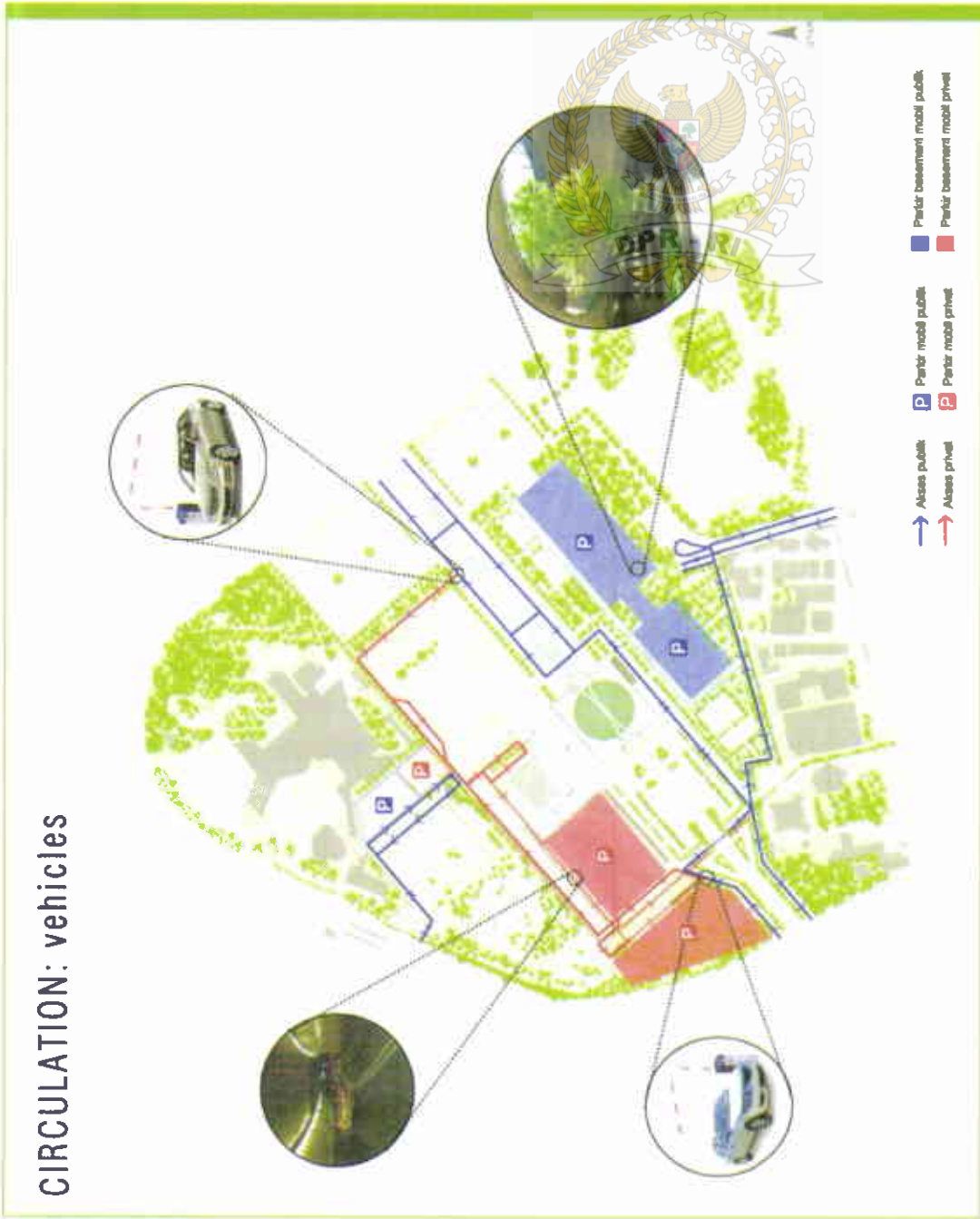
- Public Space (open)
- Public Space (covered)
- Private Space
- Corridor Access



Area privat

Private space adalah ruang kerja dan sirkulasi anggota dewan **dan** para pegawai kompleks DPR (dengan akses khusus)





CIRCULATION: pedestrian



Circulation: Pedestrian

CIRCULATION: cycling zone



pos sepeda zona bersepeda

Circulation: Cycling Zone

CIRCULATION: shuttle bus



Circulation: Shuttle Bus

TAHAPAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KOMPLEKS GEDUNG KANTOR DPR RI

Pembangunan kompleks bangunan Gedung DPR RI, terdiri dari a) pembangunan Gedung Nusantara I A; b) Poliklinik; dan c) Alun-Alun Demokrasi.

Untuk pelaksanaan pembangunan gedung kantor DPR dan poliklinik tersebut, Kementerian PUPR sesuai dengan kewenangannya dalam suratnya tertanggal 24 Oktober 2017 kepada Deputy Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI telah menyampaikan biaya pembangunan Gedung Nusantara I A seluas 116.943 m² untuk 30 lantai dan gedung poliklinik seluas 7.768,75 m² dengan taksiran pembangunan gedung sebesar Rp1.839.176.000.000 yang terbagi dalam *multi years* sejak tahun 2017–2021.

Selain ingin membangun Gedung DPR RI yang representatif, DPR juga berkeinginan untuk membangun Alun-Alun Demokrasi. Tujuan membangun Alun-Alun Demokrasi adalah agar masyarakat yang ingin memberikan aspirasinya ke Anggota di daerah pilihannya atau ingin melakukan demonstrasi tentang kebijakan negara atau kebijakan yang perlu diambil oleh DPR dapat dilakukan di Alun-Alun Demokrasi tersebut. Khusus untuk pembangunan Alun-Alun Demokrasi, taksiran biaya sebesar Rp478.604.000.000.

Untuk pekerjaan kompleks bangunan DPR tersebut melalui kegiatan: a) manajemen konstruksi; b) perencanaan konstruksi; c) pelaksanaan konstruksi; dan d) pengelolaan kegiatan.

Tabel 19
Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung
di Lingkungan Kompleks Parlemen

dalam 000.000

No	Nama Bangunan	Biaya Konstruksi Fisik	Biaya Perencanaan Konstruksi	Biaya Manajeme Konstruksi	Biaya Pengelolaan Kegiatan	Jumlah
1	Gedung Nusantara I A	1.447.568	40.871	33.295	3.347	1.839.176
2	Poliklinik	314.095				
3	Alun-alun Demokrasi	458.131	10.767	8.743	963	478.604
						2.317.780

Sumber: Surat Direktur Bina Penataan Bangunan Nomor BU 0106-Cb/1227 tanggal 7 Juli 2017

KENDALA DALAM PEMBANGUNAN KOMPLEKS PARLEMEN

Rencana pembangunan kompleks parlemen sampai saat ini belum terealisasi. Ada beberapa kendala yang berhubungan dengan hal ini, antara lain:

- 1) Pada proses perizinan, masih menunggu surat rekomendasi dari Sekretariat Negara, perihal surat keterangan bahwa tanah tidak dalam keadaan sengketa.
- 2) Belum diterbitkan analisis biaya dan pentahapan oleh Kementerian PUPR sesuai dengan perubahan luasan yang disesuaikan oleh pemenang sayembara.
- 3) Belum terdapat *masterplan* yang disetujui oleh Pimpinan DPR RI.
- 4) Alokasi anggaran pada tahun 2018 sudah terdapat dalam DIPA, tetapi masih dalam keadaan blokir oleh Kementerian Keuangan, karena masih menunggu persetujuan dari Pemerintah sehubungan dengan moratorium.

Walaupun terdapat sejumlah kendala sebagaimana disebutkan di atas, tetapi kebutuhan akan gedung baru DPR tetap perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Anggota DPR dalam rangka menjalankan ketiga fungsi DPR yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selain itu, adanya perubahan terhadap UU MD3 yang menambah satu orang Wakil Ketua DPR RI serta penambahan sebanyak 15 orang Anggota DPR berimplikasi kepada sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPR dan yang dibutuhkan oleh Anggota DPR tersebut. Oleh sebab itu Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI melalui Biro Pengelolaan BMN tetap wajib menyiapkan sarana dan prasarana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara.

RUANG KERJA ANGGOTA DPR RI

Ruang kerja Anggota DPR RI berada di Gedung Nusantara I mulai digunakan sejak tahun 1997, dan saat ini setiap Anggota menempati ruang kerja antara 28–32 m². Desain Gedung Nusantara I dengan luas 65.877 m² pada awal perencanaan diperuntukkan untuk kapasitas 800 orang. Saat ini ruang kerja Anggota tersebut digunakan untuk 1 orang Anggota dengan 5 orang tenaga ahli dan 2 asisten pribadi. Sehingga penggunaan Gedung Nusantara I yaitu 555 orang Anggota DPR RI, 2.775 orang Tenaga Ahli dan 1.110 orang Asisten Pribadi dan staf pendukung lainnya dari unsur Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dengan total penggunaan bangunan Gedung Nusantara I sebanyak ±5.000 orang.

Bila dibandingkan dengan Peraturan Presiden No 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara, setiap pejabat negara termasuk Anggota DPR layak menempati 117 m², dibandingkan dengan kondisi saat ini Anggota DPR hanya menempati ruang kerja antara 28–32 m² bersama dengan tenaga ahli dan asisten pribadi.

Berdasarkan hasil Audit Kemen PUPR tertanggal 22 Desember 2017, disebutkan bahwa ruang kerja Anggota DPR RI saat ini tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai tempat kerja yang layak, karena tidak memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan aksesibilitas dalam bangunan. Di samping itu terjadinya penambahan beban terhadap Gedung Nusantara I berupa sarana dan prasarana yang terdapat dalam setiap ruang kerja Anggota dan ruang kerja dari tenaga ahli, asisten pribadi dan unsur pendukung lainnya.

BAB V



ARSITEK PERUBAHAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6/SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No 2 Tahun 2016, Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Administrasi.

Biro Pengelolaan BMN adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Administrasi yang dipimpin oleh seorang Deputi. Biro Pengelolaan BMN mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta pengelolaan Wisma DPR RI.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden No 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka Sekretaris Jenderal DPR RI menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal No Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 2 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa sistem pendukung DPR RI terdiri atas:

- 1) Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
- 2) Badan Keahlian DPR RI.

Salah satu unit kerja di bawah Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Biro Pengelolaan BMN. Biro Pengelolaan BMN mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan rumah jabatan Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta pengelolaan Wisma DPR RI.



Rapat Biro Pengelolaan BMN

BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Tugas

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disebutkan bahwa Biro Pengelolaan BMN mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara, pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI, serta pengelolaan Wisma DPR RI.

Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas, Biro Pengelolaan BMN mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Biro Pengelolaan BMN;
- 2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Biro Pengelolaan BMN;
- 3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Biro Pengelolaan BMN;
- 4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Biro Pengelolaan BMN;
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik negara, pengelolaan gedung dan instalasi, Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta Wisma DPR RI;
- 6) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik negara, pengelolaan gedung dan instalasi, Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta Wisma DPR RI;
- 7) Pelaksanaan penatausahaan barang milik negara;
- 8) Pengelolaan gedung dan instalasi;
- 9) Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota DPR RI;
- 10) Pengelolaan Wisma DPR RI;
- 11) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Deputi Bidang Administrasi;



Toner



Pembakaran

Bagian Gedung dan Instalasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan gedung dan pertamanan serta melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan instalasi.

Bagian Gedung dan Instalasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Gedung dan Instalasi;
- 2) Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan gedung dan pengoperasian instalasi;
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan gedung dan pengoperasian instalasi;
- 4) Pengelolaan gedung dan pertamanan;
- 5) Pengoperasian mekanikal;
- 6) Pengoperasian elektrikal;
- 7) Pelaksanaan tata usaha Bagian Gedung dan Instalasi;
- 8) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN; dan
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN.



Taman Depan Gedung Mekanik

Bagian Gedung dan Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Sub-Bagian Gedung dan Taman;
- 2) Sub-Bagian Mekanikal; dan
- 3) Sub-Bagian Elektrikal.



Taman Depan Gedung Mekanik



Taman Air Mancur Belakang



Taman Nusantara



Taman Jati

Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan rumah jabatan;
- 2) Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan rumah jabatan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan rumah jabatan;
- 4) Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota di kawasan Kalibata;
- 5) Pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI;
- 6) Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota di kawasan Ulujami;
- 7) Pelaksanaan tata usaha Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan;
- 8) Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Biro Pengelola BMN; dan
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN.

Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Sub-Bagian Pengelolaan RJA Kalibata; dan
- 2) Sub-Bagian Pengelolaan RJ Pimpinan dan RJA Ulujami.

Bagian Pengelolaan Wisma mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengelolaan, dan pemeliharaan Wisma DPR RI.

Bagian Pengelolaan Wisma mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Wisma DPR RI;
- 2) Penyusunan bahan kegiatan di bidang pengelolaan Wisma DPR RI;
- 3) Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan Wisma DPR RI;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha Bagian Pengelolaan Wisma DPR RI;
- 5) Pelaksanaan pelayanan Wisma DPR RI;
- 6) Pelaksanaan pemeliharaan Wisma DPR RI;
- 7) Pelaksanaan kegiatan lain yang di tugaskan oleh Kepala Biro Pengelola Barang Milik Negara; dan

- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN.

Bagian Pengelolaan Wisma dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- 1) Sub-Bagian Pelayanan Wisma; dan
- 2) Sub-Bagian Pemeliharaan Wisma.



VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN, maka disusun perencanaan strategis sejak tahun 2016–2019. Melalui perencanaan strategis ini diharapkan apa yang menjadi tanggung jawab Biro Pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk mengkonkretisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN maka diperlukan kesinambungan perencanaan selama tahun 2016–2019, dan kesinambungan tersebut tidak terlepas dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dari Biro Pengelolaan BMN.

Visi

Visi adalah gambaran ideal yang harus dijalankan oleh Biro Pengelolaan BMN dan unit kerja di bawah Biro Pengelolaan BMN. Visi dari Biro Pengelolaan BMN tidak terlepas dari tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Biro Pengelolaan BMN, dan visi dari Biro Pengelolaan BMN juga mengacu kepada visi dari Deputi Bidang Administrasi.

Adapun visi dari Biro Pengelolaan BMN yaitu:

Terselenggaranya Pengelolaan Barang Milik Negara secara transparan dan akuntabel

Penjelasan Visi

Biro Pengelolaan BMN sesuai dengan tugas dan fungsinya harus mampu memenuhi semua kebutuhan untuk menunjang kelancaran kinerja DPR RI serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, dan harus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan pengelolaan barang milik negara.

Adapun pengertian “transparan” yaitu kesediaan untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses pengelolaan barang milik negara.

Adapun pengertian “akuntabel” yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara dapat dipertanggungjawabkan.

Misi

Misi merupakan tindak lanjut (*action*) dari visi yang telah ditetapkan bagi Biro Pengelolaan BMN. Untuk menjalankan misi tersebut tidak terlepas dari fungsi yang melingkupi dari Biro Pengelolaan BMN. Adapun misi dari Biro Pengelolaan BMN, yaitu:

- 1) Meningkatnya tata kelola administrasi pengelolaan barang milik negara secara transparan dan akuntabel.
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan aset, pengelolaan gedung, instalasi, Rumah Jabatan dan Wisma DPR RI sesuai dengan standar.

Penjelasan Misi

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN. Ada 2 misi utama yang disusun untuk mencapai visi, “Menjadi Biro Pengelolaan BMN yang tranparan dan akuntabel”.

Pada misi pertama, “Meningkatnya tata kelola administrasi pengelolaan barang milik negara secara transparan dan akuntabel”, agar arah pengelolaan barang milik negara termasuk aset negara di setiap pengguna barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset-aset negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada DPR RI serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Tertib pencatatan dimulai sejak dari tahap pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pengelolaan aset negara memberikan acuan bahwa aset negara harus digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pelayanan, dan dimungkinkan fungsi budgeter dalam pemanfaatan aset untuk memberikan kontribusi penerimaan bagi negara. Penanganan aset negara yang mengikuti kaedah-kaedah

tata kelola yang baik (*good governance*) akan menjadi salah satu modal dasar yang penting dalam penyusunan Laporan Keuangan DPR RI yang transparan dan akuntabel.

Misi kedua, “Meningkatnya kualitas pengelolaan aset, pengelolaan gedung, instalasi, Rumah Jabatan dan Wisma DPR RI sesuai dengan standar”, diartikan bahwa pengelolaan aset negara tidak sekadar administratif belaka, tetapi lebih maju berpikir dalam menangani aset negara, dengan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.

Lingkup pengelolaan aset negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pada tahap pengadaan mengenai detail spesifikasi aset harus dirinci dengan jelas, baik untuk aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Biro Pengelolaan BMN dalam memberikan dukungan kepada DPR RI serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI akan senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara, pengelolaan gedung dan instalasi, pengelolaan Rumah Jabatan Pimpinan DPR RI serta pengelolaan Wisma DPR RI untuk mewujudkan pengelolaan barang milik negara yang tertib, tetap guna dan tepat sasaran.

Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran konkret dari visi yang akan dicapai oleh Biro Pengelolaan BMN dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2016–2019. Maka tujuan strategis dari Biro Pengelolaan BMN yang akan dicapai dan dijabarkan pada tahun 2016 – 2019, yaitu:

- 1) Tercapainya administrasi penatakelolaan barang milik negara yang akuntabel.
- 2) Tercapainya pengelolaan gedung, instalasi, Rumah Jabatan dan Wisma DPR RI sesuai dengan standar.

Kedua tujuan di atas menekankan bahwa dalam penatausahaan barang milik negara harus dilaksanakan secara tertib administrasi dengan basis data yang senantiasa diperbaharui. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah, bahwa dalam penatausahaan barang milik negara juga termasuk di dalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi barang milik negara dalam rangka terlaksananya tertib administrasi termasuk dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan barang milik negara dalam menyediakan data yang selalu terkini, yang dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Ukuran tingkat pencapaian tujuan tersebut dijelaskan dalam sasaran strategis dari Biro Pengelolaan BMN di bawah ini. Sasaran program ini akan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya hasil (*output*) dari program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari Biro Pengelolaan BMN.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Biro Pengelolaan BMN selama tahun 2016–2019. Sasaran strategis ini akan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya hasil (*output*) dari program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dari Biro Pengelolaan BMN.

Adapun sasaran strategis dari Biro Pengelolaan BMN dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya tata kelola administrasi pengelolaan barang milik negara yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan BMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara tepat waktu dan akuntabel.
- 2) Terselenggaranya pengelolaan barang milik negara, gedung, instalasi, Rumah Jabatan, Wisma DPR RI, dan taman melalui pemeliharaan yang berkesinambungan.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan bagi Biro Pengelolaan BMN sangat tergantung kepada program dan kegiatan yang berinduk utama pada Sekretaris Jenderal DPR RI dan Deputi Bidang Administrasi yang tertuang pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI dan Renstra Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Arah Kebijakan

Adapun arah kebijakan dari Biro Pengelolaan BMN selama 5 tahun ke depan atau pada tahun anggaran 2016–2019 yaitu:

- 1) Menatausahakan administrasi barang milik negara di setiap unit kerja, agar penggunaan barang milik negara sesuai dengan manfaat dan kepentingan dari pengguna barang milik negara.
- 2) Meningkatkan penggunaan barang milik negara yang sudah ada selama ini, agar setiap pengguna barang milik negara menyadari bahwa barang milik negara yang ada dapat dioptimalkan sesuai dengan kepentingan dari pengguna barang milik negara yang bersangkutan.
- 3) Menyadarkan setiap pengguna barang milik negara, bahwa barang milik negara merupakan milik negara, dengan memelihara barang milik negara tersebut dan dapat digunakan dengan lebih baik.
- 4) Mengoptimalkan barang milik negara yang ada selama ini dengan memelihara barang milik negara secara rutin dan berkesinambungan, dengan melakukan pencatatan barang milik negara sesuai dengan standardisasi barang milik negara.

Strategi

Strategi yang dikembangkan Biro Pengelolaan BMN dalam melaksanakan arah kebijakan yang telah ditetapkan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Pengelolaan barang milik negara yang efektif dan efisien.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana yang efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan prasyarat untuk mengukur tingkat pencapaian dari setiap unit kerja, termasuk Biro Pengelolaan BMN. Tingkat pencapaian ini didasarkan kepada tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan atas pencapaian tersebut. Terhadap tingkat keberhasilan atau tingkat kegagalan atas pencapaian tersebut harus didasarkan kepada alasan mengapa terjadi tingkat keberhasilan dan faktor apa yang menyebabkan terjadinya tingkat kegagalan atas tingkat pencapaian tersebut.

Skala tingkat pencapaian diukur dari skala 0% sampai dengan skala 100%. Parameter untuk tingkat pencapaian biasanya ditentukan sejak awal tahun oleh Biro Pengelolaan BMN dan tingkat pencapaian tersebut merupakan usulan dari unit kerja di bawah Biro Pengelolaan BMN yang bersangkutan.

Adapun tingkat pencapaian dari Biro Pengelolaan BMN yaitu jumlah atau persentase yang akan dicapai oleh Biro Pengelolaan BMN setiap tahunnya. IKU ini dijabarkan ke dalam beberapa indikator kinerja utama dari bagian yang berada di bawah Biro Pengelolaan BMN, yaitu:

Tabel 20
Target Indikator Kinerja Program
atas Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

Sasaran Program

Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi dan
 persidangan kepada DPR RI yang optimal.

Indikator Kinerja Program	Target Kinerja
Tersedianya dukungan teknis dan administrasi serta sarana dan prasarana yang memadai.	Tahun 2016 = 90% Tahun 2017 = 92% Tahun 2018 = 94% Tahun 2019 = 96%
Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
Jumlah bahan kebijakan Biro Pengelolaan BMN	Tahun 2016 = 4 Tahun 2017 = 3 Tahun 2018 = 3 Tahun 2019 = 4
Jumlah laporan barang milik negara	Tahun 2016 = 10 Tahun 2017 = 10 Tahun 2018 = 10 Tahun 2019 = 10
Jumlah dokumen pengelolaan sarana dan prasarana	Tahun 2016 = 4 Tahun 2017 = 4 Tahun 2018 = 4 Tahun 2019 = 5
Jumlah dokumen pengelolaan Rumah Jabatan	Tahun 2016 = 3 Tahun 2017 = 3 Tahun 2018 = 3 Tahun 2019 = 3
Jumlah dokumen pengelolaan Wisma DPR RI	Tahun 2016 = 2 Tahun 2017 = 2 Tahun 2018 = 2 Tahun 2019 = 2

Sumber: Rensta Setjen dan Badan Keahlian DPR RI 2016–2019, hal. 41.

Sumber Daya Manusia

Untuk mengelola barang milik negara dibutuhkan sumber daya manusia, baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai non-PNS (sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)/Pegawai Tidak Tetap (PTT)) baik di lingkungan Biro Pengelolaan BMN atau di luar lingkungan Biro Pengelolaan BMN.

Tabel 21
Sumber Daya Manusia
Biro Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal DPR RI
Tahun 2018

No	Unit Kerja	Biro	Kabag	Kasubag	PNS	Non-PNS	Jumlah
1	Biro Pengelolaan BMN	1			2	6	9
2	Bag. Administrasi Pengelolaan BMN		1	3	11	5	20
3	Bag. Gedung & Instalasi		1	3	88	82	174
4	Bag. Pengelolaan RJ		1	2	18	31	52
5	Bag. Pengelolaan Wisma		1	2	25	21	49
Jumlah		1	4	10	144	145	304

*Sumber Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI,
Des. 2018.*

Keuangan

Kebutuhan untuk mengelola aset yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPR RI membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dari tahun ke tahun.

Tabel 22
Anggaran Pengelolaan Barang Milik Negara

dalam (000.000)

No	Bagian	Anggaran TA 2016	Realisasi TA 2016	Pagu Anggaran TA 2017	Realisasi TA 2017	Pagu Anggaran TA 2018	Realisasi TA 2018	Pagu Anggaran 2019
1	Anggaran Biro	505,6	317,4	562,6	806,8	960,0	806,8	960,0
2	Bag Adm BMN	5.615,9	2.339,8	6.639,4	3.518,2	3.841,7	3.499,9	4.506,6
3	Bag Gedung & Instalasi	351.738,9	195.577,0	269.418,1	297.043,7	311.467,1	296.685,1	433.027,6
4	Bag Pengelolaan RJ	102.650,6	79.920,8	53.540,6	47.663,7	51.622,7	47.715,9	81.810,1
5	Bag Pengelolaan Wisma	14.082,2	12.120,8	33.324,8	18.282,0	20.257,1	18.229,1	26.641,7
		474.594,2	290.275,8	380.338,9	367.314,4	388.148,4	366.936,8	546.945,9

Sumber Bagian Keuangan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Maret 2019.

HAMBATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Dalam Renstra DPR RI 2015–2019 telah disebutkan bahwa adanya sarana dan prasarana yang belum mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sekarang ini, kebutuhan sarana dan prasarana secara fisik (infrastruktur) terus meningkat, tetapi tidak didukung dengan pembangunan yang signifikan. Masalah infrastruktur yang dihadapi antara lain:

- 1) Kekurangan infratraktur bangunan fisik yang representatif untuk kebutuhan DPR RI serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hal ini sulit direalisasikan pembangunannya karena sering mendapat respons negatif dari publik.
- 2) Ketiadaan basis data infrastruktur sehingga perencanaan pemeliharaan kurang didukung dengan data pendukung yang valid.

Di sisi tata kelola sarana dan prasarana juga masih terdapat beberapa persoalan, misalnya pengelolaan pengamanan masih menghadapi beberapa kendala berikut, yaitu:

- 1) Luasnya area yang harus menjadi target pengamanan ± 60 hektare.
- 2) Penataan kawasan yang belum terintegrasi sehingga masih terdapat celah-celah yang memungkinkan kekurangoptimalan pengamanan.
- 3) Faktor kultural yaitu masih adanya sebagian Anggota DPR, karyawan, tamu dan pengunjung yang tidak ingin diatur serta masih rendahnya disiplin.
- 4) Belum adanya tempat khusus bagi pengunjung rasa sehingga pengunjung rasa cenderung berpotensi untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan.
- 5) Adanya lembaga lain dalam satu kompleks sehingga dapat memunculkan ego sektoral dan berdampak pada rendahnya koordinasi di antara sekretariat lembaga negara.

- 6) Adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Gedung DPR RI adalah gedung rakyat sehingga masyarakat bebas untuk memasuki kawasan Gedung DPR RI.

Ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi oleh Biro Pengelolaan BMN sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 23
Hambatan/Kendala Biro Pengelolaan BMN

Hambatan/Kendala
<p>Biro Pengelolaan BMN</p> <p>Keterbatasan anggaran terhadap pengelolaan barang milik negara yang ada di DPR RI, khususnya di bidang bangunan gedung.</p> <p>Adanya kegiatan-kegiatan DPR RI yang baru muncul akibat dari permintaan Anggota DPR yang belum ada anggarannya, sehingga perlu dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu.</p> <p>Ada beberapa kejadian <i>force majeure</i> seperti dampak gempa dan gedung kaca ruang kerja Anggota DPR yang terkena peluru nyasar mengingat adanya tempat menembak milik Perbakin yang dekat dengan Gedung Nusantara I.</p>
<p>Bagian Administrasi BMN</p> <p>Besarnya jumlah aset yang harus dikelola dan beragamnya jenis aset yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menjadikan permasalahan tersendiri dikarenakan minimnya SDM yang menangani barang milik negara di Bagian Administrasi BMN.</p> <p>Pelaksanaan SIMAK BMN terutama dalam penerapan aplikasi SIMAK BMN maupun Aplikasi Persediaan menggunakan versi terbaru, sehingga berdampak kepada terlambatnya laporan dari unit-unit kerja yang melakukan penginputan data barang persediaan karena karena melakukan <i>install</i> ulang ke dalam versi terbaru.</p>

Hambatan/Kendala

Masih banyaknya aset-aset yang tidak segera diusulkan untuk dihapuskan ke Biro Pengelolaan BMN, sehingga banyak aset-aset yang menumpuk di lorong-lorong atau *basement* dikarenakan terbatasnya gudang untuk menampung aset-aset tersebut, sehingga mengganggu keindahan, kenyamanan dan keamanan.

Pelaksanaan pelabelan BMN pada RJA belum dapat dilaksanakan secara optimal karena ada beberapa penolakan dari para penghuninya walaupun sudah ada surat pemberitahuan.

Bagian Gedung dan Instalasi

Tingginya volume dalam melakukan renovasi dan perubahan ruangan yang mengakibatkan barang-barang inventaris kantor sulit ditelusuri keberadaannya.

Banyaknya sarana dan prasarana yang perlu dilakukan perbaikan atau renovasi tetapi belum tercukupi alokasi anggaran karena keterbatasan pagu dalam DIPA Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Pada struktur penganggaran dalam DIPA terdapat mata anggaran keluaran 994 (Layanan Perkantoran yang Masuk pada Belanja Mata Anggaran Keluaran Pemeliharaan), sedangkan pada pelaksanaannya terdapat belanja modal, sedangkan belanja 994 atau *baseline* tidak dapat dialokasikan sebagai belanja modal, sehingga terdapat deviasi pada belanja modal (antara lain modal peralatan, modal penambahan nilai gedung dan bangunan).

Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota

Barang peralatan sudah sering mengalami kerusakan karena usia masa pakai peralatan.

Kondisi rumah dan aspal jalan, taman dan sarana lain yang perlu perbaikan total.

Anggaran yang dialokasikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan kebutuhan untuk membeli peralatan cukup tinggi.

Bagian Pengelolaan Wisma

Peminjaman *bungalow* dan ruangan sidang sangat banyak permintaan tidak berbanding lurus dengan ketersediaan ruang sidang dan *bungalow*.

Hambatan/Kendala

Besaran tarif peminjaman ruang sidang dan *bungalow* tidak dapat menutupi biaya operasional.

Anggaran pemeliharaan dan operasional sangat terbatas.

Dukungan SDM di bidang layanan perhotelan masih minim.

Dalam Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 2015–2019 disebutkan adanya kelemahan terhadap sarana dan prasarana, karena jika dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana yang ada sekarang ini, kebutuhan sarana dan prasarana secara fisik (infratraktur) terus meningkat, tetapi tidak didukung dengan pembangunan yang signifikan. Masalah infrastruktur yang dihadapi yaitu:

- 1) Kekurangan infratraktur bangunan fisik yang representatif untuk kebutuhan DPR RI serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hal ini sulit direalisasikan pembangunannya karena pembangunan fisik sering mendapatkan respons negatif dari publik.
- 2) Ketiadaan basis data infrastruktur sehingga perencanaan pemeliharaan kurang didukung dengan data pendukung yang valid.

TANTANGAN

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pengelolaan BMN Tahun 2017, disebutkan adanya beberapa tantangan Biro Pengelolaan BMN di masa mendatang, yaitu:

- 1) Di bidang pengelolaan gedung dan aset tantangannya adalah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sekretariat Jenderal dalam peningkatan penataan kawasan parlemen modern dan telah diterapkan sistem pelayanan terpadu untuk mengurangi komplain (*zero complain*).
- 2) Di bidang jumlah laporan barang milik negara tantangannya adalah meningkatkan pengelolaan, penatausahaan dan penertiban terhadap barang milik negara yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Rumah Jabatan Anggota termasuk Rumah Pimpinan DPR RI, serta Wisma DPR RI.

Walaupun terdapat sejumlah tantangan di atas, tetapi tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN wajib dilaksanakan oleh Pimpinan Biro bersama seluruh pegawai di lingkungan Biro sebagaimana tugas dan fungsi yang melekat di Biro Pengelolaan BMN. Tantangan juga tidak terlepas dari dinamika DPR dalam menjalankan tugas Anggota DPR yang membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan fungsi DPR RI. Selain itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang keuangan negara dan ketentuan audit internal yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang harus dipatuhi.

Untuk menjawab tantangan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Kinerja Biro Pengelolaan BMN Tahun 2017, telah disusun Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengelolaan BMN Tahun 2018 yang menjadi tanggung jawab Kepala Biro Pengelolaan BMN melalui Penetapan Kinerja Tahun 2018. Rencana Kinerja Tahunan Biro Pengelolaan BMN Tahun 2018 tidak terlepas dari Rencana Strategis Biro Pengelolaan BMN Tahun 2014–2019.

UPAYA DAN OPTIMALISASI

Kegiatan DPR RI melalui pelaksanaan tugas dan tiga fungsi DPR RI tidak dapat dibendung dengan keterbatasan anggaran semata. Sama halnya dengan beragam kegiatan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI khususnya Biro Pengelolaan BMN yang tidak dapat berhenti karena ketiadaan anggaran. Dalam sistem keuangan negara maka setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dimungkinkan melakukan optimalisasi anggaran yang dimilikinya. Hal optimalisasi anggaran juga dilakukan oleh Biro Pengelolaan BMN guna mengantisipasi kebutuhan DPR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Biro Pengelolaan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan BMN serta Rencana Kinerja Tahunan pada setiap tahun berjalan. Hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran administrasi anggaran, dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Biro Pengelolaan BMN berhasil menyerap anggaran Biro Pengelolaan BMN di atas 90% selama tahun 2016–2018.

Upaya lainnya dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Biro Pengelolaan BMN adalah melalui perawatan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawab Biro Pengelolaan BMN sehingga sarana dan prasarana tersebut dapat mencapai target optimal. Juga dengan adanya koordinasi di antara Pimpinan Biro serta pegawai yang ada di lingkungan Biro Pengelolaan BMN.

Semua upaya dan optimalisasi oleh Biro Pengelolaan BMN tetap dikoordinasikan dengan Pimpinan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI serta dengan Pimpinan DPR RI serta Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI.

Sebagai bagian dari upaya untuk terus memperbaiki diri dan juga untuk memberikan pelayanan terbaik kepada DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, maka sejak 2016 Biro Pengelolaan BMN telah melaksanakan beragam terobosan untuk efisiensi.

Sistem dan prosedur yang dirintis diupayakan untuk selalu relevan dengan kebutuhan DPR RI dan pada saat yang sama juga dapat mendorong peningkatan kualitas. Standar, konsep, instruksi, dan juga aplikasi yang telah dikembangkan oleh Biro Pengelolaan BMN dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24
Daftar Kegiatan Penyusunan Instruksi Kerja, Konsep, dan SOP Biro Pengelolaan Barang Milik Negara

No	Tahun	Bagian	Jenis Kegiatan	Keterangan
1	2016	Wisma	SOP	Pedoman Penggunaan Wisma DPR RI
2	2016	Adm BMN	SOP	Peraturan Setjen DPR RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
3	2017	Gedung Instalasi	Aplikasi	Call Center 135
4	2017	Gedung Instalasi	Instruksi Kerja	Perencanaan Pekerjaan Perawatan/Perbaikan Bangunan Gedung DPR RI
5	2017	Gedung Instalasi	SOP	Penanganan Tanggap Darurat Kebakaran Gedung DPR RI
6	2017	Gedung Instalasi	Instruksi Kerja	Pelaksanaan Pekerjaan Perawatan/Perbaikan Gedung DPR RI
7	2017	Gedung Instalasi	Instruksi Kerja	Pengawasan Pekerjaan Perawatan/Perbaikan Gedung DPR RI
8	2017	Gedung Instalasi	SOP	Perbaikan Pekerjaan Komponen Elektrikal Gedung DPR RI
9	2017	Gedung Instalasi	Instruksi Kerja	Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Gedung DPR RI

No	Tahun	Bagian	Jenis Kegiatan	Keterangan
10	2017	Gedung Instalasi	SOP	Pekerjaan Perbaikan Komponen Arsitektur Bangunan Gedung DPR RI
11	2017	Gedung Instalasi	SOP	Pekerjaan Perbaikan Komponen Mekanikal Bangunan Gedung DPR RI
12	2017	Gedung Instalasi	SOP	Barang Persediaan Terkait Pekerjaan Perawatan Bangunan Gedung DPR RI
13	2017	Gedung Instalasi	Konsep	Pengembangan Sistem Pemeliharaan dan Perawatan untuk Gedung Menggunakan BIM
14	2017	Adm BMN	SOP	Pelaporan Barang Persediaan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
15	2017	Adm BMN	SOP	Penggunaan dan Pemanfaatan Lahan Bangunan di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
16	2017	Adm BMN	SOP	Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
17	2017	Adm BMN	SOP	Penyusunan RK BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
18	2017	Adm BMN	SOP	Pengajuan Penetapan Status BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
19	2017	Adm BMN	SOP	Pembuatan Daftar Barang

No	Tahun	Bagian	Jenis Kegiatan	Keterangan
20	2017	Adm BMN	SOP	Peraturan Sekjen DPR RI No 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Atas Pengelolaan BMN di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
21	2017	Adm BMN	SOP	Peraturan Sekjen DPR RI No 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Administrasi BMN Berupa Asset Tak Berwujud di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
22	2018	Gedung Instalasi	SOP	Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Arsitektur Bangunan Gedung DPR RI
23	2018	Gedung Instalasi	SOP	Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Elektrikal Bangunan Gedung DPR RI
24	2018	Gedung Instalasi	SOP	Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Mekanikal Bangunan Gedung DPR RI
25	2018	Gedung Instalasi	SOP	Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Struktur Bangunan Gedung DPR RI
26	2018	Gedung Instalasi	SOP	Prosedur Perbaikan Pekerjaan Komponen Struktur dan Komponen dan Tata Graha/ Lansekap Bangunan Gedung DPR RI

BAB VI

PENUTUP



Lembaga DPR RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945 telah berdiri sejak tahun 1945 sampai sekarang. Gedung DPR RI ketika itu belum berdiri di kompleks Senayan, karena Gedung DPR RI sering berpindah-pindah sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 1965.

Gedung DPR RI menjadi terkenal sejak dibangunnya gedung kura-kura ini tahun 1965, sehingga tidak heran jika gedung kura-kura tersebut menjadi ikon bangunan yang terkenal di Indonesia sampai sekarang. Gedung kura-kura ini kemudian dinamakan sebagai Gedung Nusantara, yang menggambarkan kepulauan nusantara sebagai cikal bakal nama gedung tersebut.

Banyak pihak yang belum mengetahui bahwa gedung kura-kura ini dibangun semula untuk menyukseskan acara *Conference of the New Emerging Forces* (Conefo) di Jakarta. Pembangunan gedung ini diinisiasi oleh Presiden Soekarno tanggal 8 Maret 1965 dan baru selesai seluruh pembangunan kompleks DPR RI pada tahun 1968. Sedangkan gedung kesekretariatan dan bangunan balai kesehatan selesai 20 Maret 1978, dan seluruh pembangunan kompleks DPR RI dalam bentuk pembangunan auditorium dan gedung *banquet* selesai pada Februari 1983.

Momentum Gedung DPR RI semakin terkenal di belahan dunia manakala terjadi demonstrasi besar-besaran pada bulan Mei 1998, dengan masuknya ribuan masyarakat ke halaman Gedung DPR RI dan ke dalam bangunan Gedung DPR RI. Sejak itulah lembaga DPR RI mulai dikenal masyarakat luas. Dampak dari dikenalnya Gedung DPR RI adalah sejumlah kerusakan baik karena usia bangunan ataupun karena faktor eksternal.

Pembenahan Gedung DPR RI sebagai bagian dari barang milik negara mulai di tata sejak tahun 2000 sampai sekarang, yang dimulai dari Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi (Harbangan) yang kemudian berganti nama menjadi Biro Pengelolaan BMN pada tahun 2013 sampai sekarang.

Total aset bangunan yang dimiliki oleh DPR RI baik dalam kompleks Gedung DPR RI di Senayan, maupun gedung atau bangunan lain di luar kompleks DPR RI, yaitu: 1) Rumah Pimpinan DPR RI; 2) Rumah Jabatan Anggota DPR RI di Kalibata dan Ulujami;

dan 3) Wisma DPR RI di Bogor, sangatlah besar. Bangunan gedung yang dimiliki oleh DPR RI tersebut ditata melalui pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab dari Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sampai saat ini.

Di kurun waktu yang berjalan, upaya untuk memperluas bangunan Gedung DPR RI telah dimulai sejak tahun 2010 dengan adanya rencana pembangunan kompleks DPR RI yang lebih komprehensif melalui pembangunan gedung baru DPR RI serta alun-alun demokrasi. Upaya untuk merealisasikan ini tidak mudah, khususnya karena masih terbatasnya kemampuan negara dalam pembangunan gedung pemerintahan, termasuk Gedung DPR RI, juga masih adanya reaksi masyarakat untuk menyikapi niatan DPR RI untuk membangun gedung baru tersebut.

Saat ini yang bertanggung jawab dalam memelihara dan merawat gedung-gedung DPR adalah Biro Pengelolaan BMN. Seluruh bangunan gedung termasuk sarana dan prasarana menjadi barang milik negara atau aset negara. Terhadap aset negara ini pengelolaannya juga melekat kepada Biro Pengelolaan BMN. Pengelolaan barang milik negara tersebut tetap mengacu kepada sistem administrasi pemerintahan yang berlaku, baik melalui Renstra DPR RI, Renstra Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, serta Renstra Biro Pengelolaan BMN.

Setiap tahunnya pengelolaan barang milik negara tersebut mengacu kepada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Pengelolaan BMN. Walaupun dalam pelaksanaan RKT tersebut masih tetap ditemui tantangan bagi Biro Pengelolaan BMN untuk mempersiapkan kebutuhan DPR dalam merawat Gedung DPR RI, Ruang Kerja Anggota DPR RI, termasuk rumah dinas Anggota DPR RI pada umumnya.

Hal lain yang juga masih menjadi mimpi masa mendatang bagi DPR RI khususnya bagi Biro Pengelolan BMN adalah pembangunan Gedung DPR RI yang lebih representatif karena Gedung Nusantara I tempat ruang kerja Anggota DPR RI sudah tidak layak huni lagi mengingat kapasitas gedung sudah melebihi kapasitiitas awal sebanyak 800 orang. Niatan untuk membangun kawasan gedung parlemen

telah dipersiapkan oleh Biro Pengelolaan BMN sejak tahun 2016 sampai saat ini. Hanya saja realisasi pembangunan gedung belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran negara dan untuk mencegah sikap reaktif masyarakat.

Akhirnya sebegus-bagusnya gedung yang dibangun semua kembali kepada orang yang ditugasi untuk mengelola gedung tersebut. Sehingga kesinambungan pengelolaan barang milik negara tetap perlu dilaksanakan oleh orang-orang atau pejabat yang menduduki Biro Pengelolaan BMN tersebut. Untuk itu upaya yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan atau PNS di lingkungan Biro Pengelolaan BMN perlu dihargai dengan baik. Terhadap bangunan Gedung DPR RI yang selama ini telah dikelola dengan baik oleh Biro Pengelolaan BMN tidak semata menjadi tanggung jawab biro ini semata, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh karyawan DPR RI termasuk Anggota DPR RI dalam memelihara bangunan Gedung DPR RI sesuai dengan peruntukkan dengan baik. Tanpa kerja sama yang baik antara para pihak di internal DPR RI serta eksternal DPR RI, maka sia-sialah bangunan Gedung DPR RI ini dibangun dengan uang rakyat dalam APBN Republik Indonesia.

EPILOG

Buku *Peran Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dalam Mengelola Aset Negara di Lingkungan DPR RI* ini merupakan buku yang disusun oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pengelolaan barang milik negara. Keberadaan buku ini sangat penting, sehingga sejak awal Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) langsung memimpin inisiatif penyusunan buku yang diharapkan dapat merangkum kerja Biro Pengelolaan BMN secara komprehensif.

Buku yang sarat informasi mengenai pengelolaan aset Pemerintah yang berada di dalam Kompleks MPR/DPR/DPD RI dan juga tersebar di beberapa tempat ini didasari landasan hukum yang jelas. Buku kinerja Biro Pengelolaan BMN ini dimulai dengan paparan singkat mengenai sejarah *political venue* yang dimulai di era Presiden Soekarno dan selesai di era Presiden Soeharto. Hingga saat ini, dinamika politik di lembaga politik sangat mewarnai beragam perubahan yang terjadi terhadap aset negara ini.

Kondisi empiris saat ini dilanjutkan dengan pembahasan kondisi ideal yang sebaiknya mulai dirintis oleh Biro Pengelolaan BMN merupakan sumbang saran penting bagi kemajuan pengelolaan barang milik negara di wilayah yang sejak awal telah dipastikan akan menjadi saksi sejarah bangsa. Tentunya dengan beragam informasi yang tersaji, perubahan ke arah yang lebih baik dapat mulai direncanakan secara bertanggung jawab.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang menyadari arti penting keberadaan sejarah aset negara yang berada di Kompleks Parlemen Indonesia ini.

DAFTAR BACAAN

1. Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2010–2014, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2010.
2. Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014, diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2013.
3. Rencana Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015–2019, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2014.
4. Rencana Kinerja Tahunan 2015, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2014.
5. Penetapan Kinerja DPR RI Tahun 2014, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2014.
6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2015.
7. Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia, tertanggal 18 Agustus 2015.
8. Berita Acara Serah Terima, Barang Milik Negara Sebagian Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara, tertanggal 18 Agustus 2015.
9. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2016–2019, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2016.
10. Rencana Strategis Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2016–2019, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2016.

11. Laporan Kinerja Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2016.
12. Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pengelolaan BMN Tahun 2017, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2017.
13. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2017.
14. Kronologis Rencana Penataan Kompleks Parlemen DPR RI (Pembangunan Gedung dan Alun-Alun Demokrasi), diterbitkan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2017.
15. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Bangunan Gedung, diterbitkan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2017.
16. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017, diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2018.
17. Paparan Biro Pengelolaan BMN, diterbitkan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2018.
18. Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota DPR RI Tahun 2018, diterbitkan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2018.
19. Data Sarana dan Prasarana Peralatan Teknis Pengelolaan Gedung, Mekanikal, Elektrikal, Bagian Gedung dan Instalasi, diterbitkan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2018.

20. Data Pengelolaan Wisma DPR, diterbitkan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2018.
21. Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dengan Sekretariat Negara Republik Indonesia, tertanggal 18 Agustus 2018.
22. Berita Acara Serah Terima, Barang Milik Negara Sebagian Tanah Milik Kementerian Sekretariat Negara, tertanggal 18 Agustus 2018.
23. Selayang Pandang Gedung DPR RI, diterbitkan oleh Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2018.
24. Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Negara Antara Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan (masing-masing dalam perjanjian sewa tersendiri):
 - a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - d. PT Pos Indonesia (Persero);
 - e. PT Bank Central Asia Tbk;
 - f. PT Indosat;
 - g. PT XL Axiata;
 - h. PT Telkomsel Tbk;
 - i. PT Jawa Tengah Citra Boga;
 - j. PT Masa Depan Bersama;
 - k. Yayasan Bina Baiturrahman;
 - l. Dharma Wanita Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI; dan
 - m. Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

I. *Identitas Pribadi*

1. Nama : Makmur, S.Sos., M.M.
2. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 4 Maret 1959
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Status Pernikahan : Menikah
6. Alamat Rumah : Jln. Perintis No. 25A Joglo, Kembangan Jakarta Barat
7. No.Telephone Rumah/HP : (021) 58905185 / 0811956199
8. Pekerjaan : PNS Sekretariat Jenderal DPR RI
9. Jabatan Sekarang : Kepala Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal DPR RI
10. Pangkat /Golongan : Pembina Utama / IV/e
11. Masa Kerja : 38 Tahun, 1 bulan
12. NIP : 19590304 198103 1004
13. Alamat Kantor : Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
14. No. Telepon Kantor/Fax : (021) 571 5799

II. *Pengalaman Kerja*

1. 1979 s.d. 1980 : Bekerja di Dinas PU Kab. Donggala Sulawesi Tengah
2. 1981 s.d.1984 : Staf Bagian Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
3. 1985 s.d. 1987 : Staf Bagian Perumahan
4. 1988 s.d. 1993 : Pjs. Kasubag. Peristirahatan, Bagian Perumahan dan Peristirahatan
5. 1994 s.d. 1997 : Kasubag Perumahan Pegawai, Bagian Perumahan dan Peristirahatan

6. 1997 s.d. 2000 : Kasubag Perumahan Jabatan Pimpinan dan Rumah Jabatan Anggota DPR RI, Bagian Perumahan dan Peristirahatan
7. 2000 s.d. 2005 : Kasubag Pengoperasian Mekanik Bagian Instalasi, Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi
8. 2005 s.d. 2006 : Kasubag Pengawasan Materiil (Pengawasan Internal), Biro Perencanaan dan Pengawasan
9. 2006 s.d. 2007 : Kasubag TU. Set. Komisi IV, Biro Persidangan
10. 2007 s.d. 2012 : Kepala Bagian Perencanaan
11. Okt. 2012 s.d. Mei 2013 : Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
12. Mei 2013 s.d. Des. 2015 : Kepala Biro Keuangan
13. Des. 2015 s.d. sekarang : Kepala Biro Pengelolaan BMN

III. Pendidikan

1. SD : SDN 01 Serang, Cilacap, Lulus Tahun 1972
2. SLTP : ST (Sekolah Teknik) Bangunan Gedung Sidareja Cilacap, Lulus Tahun 1975
3. SLTA : STM Negeri Kebumen Jurusan Bangunan Gedung, Lulus Tahun 1979
4. Program Strata Satu (S-1) : STIA-LAN, Jurusan Manajemen Program Pembangunan, Lulus Tahun 2001, dengan judul skripsi: "Sistem Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR RI"

5. Program Strata Dua (S-2) : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Jaya Karta, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Lulus Tahun 2004

IV. Diklat Struktural

1. DIKLAT SPALA : Angkatan VIII Tahun 1993 Sekretariat Jenderal DPR RI di Bogor dengan Predikat “Baik”
2. DIKLAT PIM : Tingkat III Angkatan XIV Departemen Perhubungan Tahun 2008 dengan Predikat “Sangat Memuaskan”
3. DIKLAT PIM : Tingkat II Angkatan XL Kelas A, Lembaga Administrasi Negara Tahun 2014 dengan Predikat “Memuaskan”

V. Diklat Non-Struktural

1. 18 s.d. 28 Juni 2002 : Diklat Pengadaan Barang dan Jasa, Departemen Keuangan, Jakarta
2. 16 Sept. s.d. 14 Okt. 2002 : Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemeliharaan Gedung, LAN-RI Jakarta
3. 8 Juli s.d. 27 Agst. 2002 : Pendidikan dan Pelatihan Analisa Jabatan Mandiri, BKN, Jakarta
4. 2006 : Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pengawasan Internal, Sekretariat Jenderal DPR RI
5. 18 Juli s.d. 25 Sept. 2003 : Pendidikan dan Pelatihan Analisa Jabatan Mandiri, BKN, Jakarta
6. 12 s.d. 16 Sept. 2005 : Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Internal Sekretariat Jenderal DPR RI

7. 2004 : Sertifikat Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Implementasi Keppres No 80 Tahun 2003) Angkatan I, LAN-RI
8. 20 Maret 2009 : Mendapat Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tingkat Pertama Kategori L2

VI. Piagam Penghargaan

1. 13 Nov. s.d. 1 Agst 1982 : Piagam Pembinaan Penataan Tingkat Instansi Pusat Tipe B. Angkatan ke-X Sekretariat Jenderal DPR RI Sesuai INPRES No 10 Tahun 1978
2. 21 Okt. s.d. 31 Okt. 1991 : Piagam Penataan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) Terpadu Sekretariat Jenderal DPR RI
3. 1 s.d. 11 Maret 1993 : Piagam Penghargaan Sidang Umum MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 1993
4. 1 s.d. 11 Maret 1998 : Piagam Penghargaan Sidang Umum MPR RI Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2003
5. 21 s.d. 29 Nov. 1996 : Piagam mengikuti Penataan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) untuk Pejabat Eselon III & IV Instansi Pemerintah Tingkat Pusat di Lingkungan Lembaga Tertinggi Negara Angkatan Ke-IV

6. 2 Agustus 1999 : Piagam Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun
7. 8 Juli 2007 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun
8. 17 Agustus 2011 : Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun
9. 2013, 2014, dan 2015 : Penghargaan Bendaharawan Satker Dewan dan Satker Setjen DPR RI terbaik dari Kementerian Keuangan RI
: Penghargaan Pengelolaan *Data Supplier* Terbaik dari Kementerian Keuangan RI
: Penghargaan Bendahara Berkinerja Terbaik dalam Pelaporan Pajak Satker Dewan dan Satker Setjen DPR RI
10. 2018 : Peringkat 10 (Sepuluh) Besar Lomba "*The Asset Manager*" dari 57 peserta tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI
: Penghargaan atas Pengelolaan PNBPNP terbaik dari Menteri Keuangan RI

VII. Pengalaman Lainnya dalam Kedinasan

1. Menjabat Sekretaris Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2010–2014 sesuai SK Sekjen No 447A/SETJEN/2008 tanggal 2 Juni 2008 (Tahun 2008 s.d. Tahun 2010).

2. Menjabat Sekretaris Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2010–2014 sesuai SK Sekjen No 876/SETJEN/2010 tanggal 1 Juni 2011.
3. Menjabat Ketua Tim Kerja Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2009 sesuai SK Sekjen No 133A/SETJEN/2008 tanggal 3 Maret 2008 (Tahun 2008 s.d. sekarang).
4. Menjabat Sekretaris Tim Kerja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Setjen DPR RI Tahun 2009 sesuai SK Sekjen No 10A/SETJEN/2008 tanggal 2 Januari 2008 (Tahun 2008 s.d. sekarang).
5. Menjabat Ketua Tim Kerja Evaluasi Pelaksanaan/Perubahan Anggaran DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2011 sesuai SK Sekjen No 745A/SETJEN/2011 tanggal 2 Januari 2011 (Tahun 2008 s.d. sekarang).
6. Menjabat Ketua Tim Kerja Perumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2012 Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai SK Sekjen No 224/SETJEN/2011 tanggal 1 Februari 2011 (Tahun 2008 s.d. sekarang).
7. Wakil Ketua TIM PIU World Bank dari Januari s.d. Desember 2009.
8. Ketua TIM PIU World Bank dari Januari s.d. Desember 2009.
9. Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hibah Bank Dunia (Tahun 2010 s.d. Tahun 2013).
10. Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Biro Perencanaan dan Pengawasan (Tahun 2008 s.d. Tahun 2013).
11. Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Biro Humas dan Pemberitaan (Tahun 2011).
12. Menjabat Ketua Bidang Kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia Sekretariat Jenderal DPR RI (Tahun 2010 s.d. sekarang).

VIII. Pengalaman ke Luar Negeri dalam Rangka Kedinasan

1. Tahun 2004 : Kunjungan ke China dalam rangka Studi Banding dan Peninjauan Pabrik *Lift* dan Eskalator (*Mechanical/Electrical*).
2. Tahun 2007 : Menjadi Sekretaris Tim Studi Banding ke Filipina dalam rangka Studi Banding Pertanian dan Peternakan.
3. Tahun 2007 : Menjadi Sekretaris Tim Studi Banding ke Parlemen Australia dalam rangka Studi Banding Pertanian dan Peternakan.
4. Tahun 2009 : *Study Visit* ke Parlemen Inggris, Irlandia dan Skotlandia atas program hibah dari kegiatan World Bank.
5. Tahun 2011 : Kunjungan ke Arab Saudi dalam rangka Tim Persiapan Haji Tahun 2011.
6. Tahun 2012 : Kunjungan Kerja ke Korea Selatan.
7. Tahun 2017 : Kunjungan Kerja ke Kazakhstan.

IX. Seminar dan Workshop

1. *Workshop* Penanggulangan Korupsi yang diselenggarakan oleh KPK.
2. Seminar Penguatan dan Pembangunan Kapasitas Kelembagaan DPR RI kerja sama antara KPK dan DPR RI.
3. *Workshop-workshop* yang lainnya.

TIM PENDUKUNG



Deny Supriatna, S.Sos., M.M.
Muhammad Yus Iqbal, S.E.
Sri Wahyu Budhi Lestari, S.E., M.A.B.
Pesta Evaria Simbolon, S.E., M.Si.
Subekti
Muhadi, S.Sos.
Waluyo, S.E, M.AP.
Budiarto, S.AP, M.AP.
Adang Firmansyah, S.P.
Sutrisno, S.E.
Afif Indra Maulana, S.T.
Intan Pujakesuma, S.E.
Weda Herdyotanto Pramu Wardhana, S.E.
Parino, S.E.
Syarip, S.Pd.I.
Dalmin Priyono
Uka Sukmadarma
Sumarno
Edi Wiyono
Eko Priyono
Endang Komar, S.T., M.T
Sukatno
Dani Hamdani, S.Pd.
Deddy Cahyadi
Dwinanto
Hanum Faini, S.T.
Wildan, S.T.
Dina Khairani, ST
Yulius Arie Prayoga, S.T.
Prasetyo Hari Wibowo, S.T.
Sutikno
Karmita
Sumarko
Totok Sugiono

Dedik Wiegya Aryanto
Achmad Marulloh
Deny Apriyanto



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENYUNTING

Dr. Ronny Sautma Hotma Bako, S.H., M.H., lahir di Jakarta Maret 1962. Menjadi ASN/PNS di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 1989 s.d. 31 September 2014 (pensiun dini per 1 Oktober 2014, dengan Pangkat Pembina Utama/Golongan IV E). Saat ini menjadi Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (Nomor Induk Dosen Nasional 312036201). Penyunting menguasai dan memiliki kompetensi berijazah, antara lain Ilmu Perundang-undangan, Hukum Kontrak, Hukum Pasar Modal, Hukum Persaingan Usaha, Pemegang Brevet Pajak A, B dan C. Ada beberapa buku yang telah ditulis selain juga telah menulis beberapa karya ilmiah, menjadi pembicara masalah hukum, dan menjadi narasumber masalah hukum Indonesia di media massa nasional, di media massa internasional, di kantor hukum baik Indonesia maupun luar negeri.



H. Makmur Abdurachim atau dikenal dengan **Makmur, S.Sos., M.M.** merupakan sosok pria kelahiran Cilacap, 4 Maret 1959. Pria yang berusia 60 tahun ini mengabdikan dirinya sebagai abdi negara selama 38 tahun dengan pangkat golongan Pembina Utama. Saat ini Beliau mengemban amanah sebagai Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Makmur mengawali pendidikan dasarnya di SDN 01 Serang, Cilacap dan lulus tahun 1972. Untuk jenjang SLTP, Beliau mengenyam pendidikan di Sekolah Teknik (ST) Bangunan Gedung Sidareja, Cilacap dan lulus tahun 1975.

Jenjang lanjutan ditempuh di STM Negeri Kebumen dengan pendalaman ilmu di bidang Bangunan dengan pilihan jurusan Bangunan Gedung dan lulus di tahun 1979. Gelar sarjana ditempuh di STIA-LAN, jurusan Manajemen Program Pembangunan dan lulus di tahun 2001 dengan skripsi berjudul "Sistem Pengelolaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jendral DPR RI." Beliau juga berkesempatan mengenyam pendidikan strata dua (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Jaya Karta dengan program studi Manajemen Sumber Daya Manusia dan lulus di tahun 2004.

Sebagai seorang ASN, Makmur termasuk sosok pria yang sering mendapatkan piagam penghargaan. Penghargaan terbaru adalah 10 besar lomba "*The Asset Manager*" dari 57 peserta tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Keuangan RI tahun 2008. Di tahun yang sama pula, Beliau mendapatkan penghargaan atas pengelolaan PNBP terbaik dari Menteri Keuangan RI. Tahun 2013, 2014, dan 2015, Beliau berturut-turut mendapat penghargaan Bendaharawan Satker Dewan dan Satker Setjen DPR RI Terbaik dari Kementerian Keuangan juga penghargaan Pengelolaan *Data Supplier* Terbaik dari Kementerian Keuangan, selain juga penghargaan Bendahara Berkinerja Terbaik dalam Pelaporan Pajak Satker Dewan dan Satker Setjen DPR RI.

Selama menjalani aktivitas kedinasan, Makmur termasuk sosok yang sering mendapat amanah jabatan strategis. Selain sebagai Kepala Biro Pengelolaan BMN di DPR RI, Beliau juga menjabat Ketua Bidang Kesejahteraan Korps Pegawai Republik Indonesia Setjen DPR RI sejak 2010. Di tahun 2011, Beliau menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Biro Humas dan Pemberitaan. Tahun 2008 s.d. 2013, Beliau pernah menjabat sebagai PPK di Biro Perencanaan dan Pengawasan.